

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan. Pemerintah Kota Ternate sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas dan posisi dana cadangan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
- v. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011 – 2015.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Ternate TA 2013 dibagi ke dalam enam bab, yang terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- BAB VI : Berisi Penutup yang menguraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan TA 2013.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran (TA) 2013 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro Kota Ternate yang akan dijabarkan di bawah ini.

##### **2.1.1 Inflasi**

Indikator yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata niaga, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat, secara rata-rata.

Inflasi Kota Ternate pada Tahun 2013 adalah sebesar 9,78%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 3,29%. Semua kelompok komoditas mengalami inflasi terutama kelompok bawaan makanan, yang memberikan sumbangan terbesar dalam terjadinya inflasi di Kota Ternate.

##### **2.1.2 Ketenagakerjaan**

Dalam hal ketenagakerjaan, selain angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, permasalahan penting lainnya adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun relatif kecil, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate Tahun 2013 tercatat sebesar 4,85%. Angka ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan dengan Tahun 2012, yang tercatat sebesar 7,26%.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Dengan mengacu pada kebijakan umum dan prioritas plafon Anggaran APBD TA 2013, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada komponen belanja langsung, dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta peningkatan sektor potensial bidang perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah, dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam TA 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate mencakup 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan rincian dalam Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1 SKPD pada Pemerintah Kota Ternate TA 2013**

No. Urut	Kode SKPD	Nama SKPD
1.	10101	Dinas Pendidikan Nasional
2.	10103	Sanggar Kegiatan Belajar
3.	10201	Dinas Kesehatan
4.	10301	Dinas Pekerjaan Umum
5.	10404	Kantor Pemadam Kebakaran
6.	10502	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
7.	10601	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	10701	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
9.	10804	Dinas Kebersihan
10.	10805	Badan Lingkungan Hidup
11.	11001	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12.	11102	Kantor Pemberdayaan Perempuan
13.	11202	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB
14.	11402	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15.	11501	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16.	11703	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	11801	Dinas Pemuda dan Olahraga
18.	11903	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19.	11904	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20.	12001	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21.	12002	Walikota dan Wakil Walikota
22.	12003	Sekretariat Daerah
23.	12004	Sekretariat DPRD
24.	12005	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25.	12007	Inspektorat
26.	12011	Kecamatan Kota Ternate Utara
27.	12012	Kecamatan Kota Ternate Selatan
28.	12013	Kecamatan Pulau Ternate
29.	12014	Kecamatan Moti
30.	12015	Kecamatan Kota Ternate Tengah
31.	12016	Kecamatan Pulau Batang Dua
32.	12017	Kecamatan Hiri
33.	12018	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34.	12019	Dinas Pendapatan
35.	12102	Badan Kepegawaian Daerah
36.	12202	Badan Pemberdayaan Masyarakat
37.	12402	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
38.	20105	Dinas Pertanian dan Kehutanan
39.	20106	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K)
40.	20501	Dinas Kelautan dan Perikanan
41.	20602	Dinas Pasar
42.	20702	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate pada TA 2013 diarahkan pada langkah-langkah antara lain: (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat; (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil; (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Kota Ternate dalam pengelolaan berbagai aset daerah; (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Pengelolaan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dengan ketentuan tersebut, maka struktur Pendapatan Daerah Kota Ternate terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah;
  - 2) Pendapatan Retribusi Daerah;
  - 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - 4) Lain-Lain PAD yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari:
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, terdiri dari:
    - a) Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan;
    - b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
    - c) Dana Alokasi Umum, dan
    - d) Dana Alokasi Khusus.
  - 2) Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi;
  - 3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:
    - a) Pendapatan Hibah;
    - b) Dana Penyesuaian;
    - c) Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah yang dituangkan dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Ternate diarahkan pada hal-hal berikut:

- a. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
- 1) Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - 2) Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
  - 3) Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
  - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
  - 5) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kota Ternate.
  - 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
  - 7) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba PD Citra Gamalama, PDAM, dan PT BPR Syariah Bahari Berkesan;
  - 8) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil, melalui:
- 1) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
  - 2) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
  - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
- c. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Kota Ternate diharapkan dapat meningkat sesuai dengan target yang ingin dicapai.



### **2.2.2 Kebijakan Belanja**

Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Adapun kebijakan belanja Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan;
- b. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas;
- c. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas;
- d. Kebijakan APBD yang Proporsional dan Pro Rakyat;
- e. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis;
- f. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif;
- g. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja;
- h. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah;
- i. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan;
- j. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat;
- k. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

### **2.2.3 Kebijakan Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan Daerah pada TA 2013 terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun anggaran berikutnya, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja;
  - 2) Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.
- b. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:
- 1) Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
  - 2) Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran;
  - 3) Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

### **2.3.1 Capaian Target Kinerja Pendapatan**

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp646.699.626.570,00 dari target setelah perubahan sebesar Rp648.213.367.000,00, atau sebesar 99,77% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi pendapatan daerah kurang dari target sebesar 0,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah pada TA 2012 yang tercatat sebesar Rp574.486.330.945,00, maka kinerja pendapatan daerah TA 2013 meningkat sebesar 12,57%.

Realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya mencapai 93,19%. Apabila nilai realisasi PAD TA 2013 dibandingkan dengan nilai realisasi PAD TA 2012, maka realisasi PAD TA 2013 naik sebesar 23,29%. Di sisi lain yaitu pendapatan transfer yang bersumber dari dana perimbangan dan dana transfer lainnya, realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar 100,26%. Apabila nilai realisasi pendapatan transfer TA 2013 dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2012, maka realisasi pendapatan transfer TA 2013 naik

sebesar 12,48%. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah, sampai dengan akhir TA 2013 realisasinya mencapai 45,77%. Apabila nilai realisasi TA 2013 dibandingkan dengan lain-lain pendapatan yang sah TA 2012, maka realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada TA 2013 turun sebesar 95,79%.

### **2.3.2 Capaian Target Kinerja Belanja Daerah**

Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp644.511.331.313,00 dari target setelah perubahan sebesar Rp680.242.853.875,00, atau sebesar 94,75% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian, sisa anggaran belanja pada TA 2013 yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp35.731.522.562,00 atau 5,25%. Apabila dibandingkan dengan kinerja belanja daerah TA 2012 yang dianggarkan sebesar Rp599.944.240.370,00 realisasinya tercatat sebesar Rp583.598.274.723,00 atau 97,28%, maka kinerja Belanja Daerah di TA 2013 mengalami kenaikan persentase sebesar 10,44%.

### **2.3.3 Capaian Target Kinerja Pembiayaan**

Target pencapaian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp37.779.486.875,00 sampai dengan akhir TA 2013 realisasinya sebesar minus Rp14.416.677.770,00. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan dari target setelah perubahan pada TA 2013 sebesar Rp5.750.000.000,00, telah terealisasi sebesar Rp5.579.600.000,00 atau 97,04%.

### **BAB III**

#### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Realisasi pencapaian target kinerja pendapatan daerah TA 2013 telah mencapai hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat tergambar pada pendapatan daerah TA 2013 yang ditargetkan sebesar Rp648.213.367.000,00, telah terealisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp646.699.626.570,00 atau 99,77% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah TA 2012 yang tercatat sebesar Rp574.486.330.945,00, realisasi pendapatan daerah TA 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp72.213.295.625,00 atau 12,57%. Penjabaran realisasi pendapatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Target pendapatan asli daerah pada TA 2013 sebesar Rp43.535.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp40.572.363.457,00 atau 93,19% dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Pajak Daerah**

Target pajak daerah pada TA 2013 sebesar Rp20.500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp21.586.741.654,00 atau 105,30%.

##### **2) Retribusi Daerah**

Target retribusi daerah pada TA 2013 sebesar Rp15.671.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp12.765.797.677,00 atau 81,46%.

##### **3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada TA 2013 sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp365.392.583,00 atau 73,08%.

##### **4) Lain-lain PAD yang Sah**

Target lain-lain PAD yang sah pada TA 2013 sebesar Rp6.864.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp5.854.431.543,00 atau 85,29%.

##### **b. Pendapatan Transfer**

Target pendapatan transfer pada TA 2013 sebesar Rp604.418.367.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun adalah sebesar Rp606.008.253.543,00 atau 100,26%, dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Bagi Hasil Pajak**

Target bagi hasil pajak pada TA 2013 sebesar Rp33.500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp29.628.043.318,00 atau 88,44%.

2) Bagi Hasil Sumber Daya Alam/ Bukan Pajak

Target bagi hasil sumber daya alam pada TA 2013 sebesar Rp6.772.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp11.725.673.617,00 atau 173,15%.

3) Dana Alokasi Umum

Target Dana Alokasi Umum pada TA 2013 sebesar Rp462.645.746.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp462.645.746.000,00 atau 100,00%.

4) Dana Alokasi Khusus

Target Dana Alokasi Khusus pada TA 2013 sebesar Rp44.427.830.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp44.427.830.000,00 atau 100,00%.

5) Dana Penyesuaian

Target dana penyesuaian pada TA 2013 sebesar Rp49.722.791.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp51.240.275.000,00 atau 103,05%.

6) Bagi Hasil Propinsi

Target bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada TA 2013 sebesar Rp7.350.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp6.340.685.608,00 atau 86,27 %.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada TA 2013 sebesar Rp260.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp119.009.570,00 atau 45,77 %. Penerimaan tersebut berasal dari setoran PT Taspen.

Adapun permasalahan dan solusi di bidang pendapatan daerah dalam TA 2013, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan:

- 1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan kewajibannya terhadap daerah;
- 2) Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah;
- 3) Kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.

b. Solusi:

- 1) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat secara intens;
- 2) Menegakkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang sengaja melalaikan kewajibannya;
- 3) Melakukan koordinasi secara rutin bagi dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.

- 4) Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, dan lain sebagainya, yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.

### 3.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah dalam anggaran setelah perubahan pada TA 2013, ditargetkan sebesar Rp680.242.853.875,00. Realisasi belanja daerah sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp644.511.331.313,00 atau 94,75%. Dengan demikian, jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp35.731.522.562,00 atau 5,25%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja daerah TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp583.598.274.723,00, terlihat realisasi belanja daerah TA 2013 naik sebesar Rp60.913.056.590,00 atau 10,44%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah TA 2013 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Target belanja pegawai pada TA 2013 adalah sebesar Rp390.380.054.802,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp379.405.767.226,00 atau 97,19%.

b. Belanja Barang

Target belanja barang pada TA 2013 sebesar Rp136.134.089.609,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp125.498.895.812,00 atau 92,19%.

c. Belanja Bunga

Target belanja bunga pada TA 2013 sebesar Rp333.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp218.856.504,00 atau 65,72%.

d. Belanja Hibah

Target belanja hibah pada TA 2013 sebesar Rp4.882.806.500,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.739.102.000,00 atau 97,06%.

e. Belanja Bantuan Sosial

Target belanja bantuan sosial pada TA 2013 sebesar Rp5.739.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp2.442.860.716,00 atau 42,57%.

f. Belanja Modal

Target belanja modal pada TA 2013 sebesar Rp135.773.902.964,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp127.082.093.635,00 atau 93,60%.

g. Belanja Tidak Terduga

Target belanja tidak terduga pada TA 2013 sebesar Rp7.000.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp5.123.755.420,00 atau 73,20%.

Adapun permasalahan dan solusi di bidang belanja daerah dalam TA 2013, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan
  - 1) Kebijakan regulasi yang begitu cepat berubah menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja yang belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.
  - 2) Penyusunan laporan-laporan SKPD terkait belanja masih banyak yang tidak tepat waktu.
- b. Solusi
  - 1) Perlu adanya sosialisasi untuk kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
  - 2) Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak terlambat menyampaikan laporan terkait belanja.

### 3.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi pembiayaan daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2013 yang bersaldo negatif dikarenakan pada TA 2012 terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar minus Rp14.416.677.770,00. Sedangkan realisasi pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp5.579.600.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp1.000.000.000,00, PT BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp2.250.000.000,00, PD Citra Gamalama sebesar Rp1.829.600.000,00, dan Bank Maluku sebesar Rp500.000.000,00.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat bahwa posisi SiKPA TA 2013 adalah sebagai berikut:

Pendapatan yang tidak mencapai target TA 2013	Rp	1.513.740.430,00
Sisa anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir TA 2013	Rp	35.731.522.562,00
Sisa anggaran pembiayaan	Rp	52.039.846.415,00

Dengan demikian, saldo SiKPA TA 2013 tercatat sebesar minus Rp17.822.064.283,00.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran (TA) 2013 terdiri dari beberapa komponen yaitu: (1) Neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Ternate. DPKAD Kota Ternate adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disusun berdasarkan konsolidasian dari Laporan Keuangan 42 (empat puluh dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan SKPD lainnya yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini DPKAD Kota Ternate dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya mempunyai ciri-ciri:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;



- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar *cash towards accrual* yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
- b. Penyajian pos-pos neraca berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate TA 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis;
- c. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut;
- d. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut;

- e. Pengukuran laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

Basis pengukuran per akun yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate TA 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Basis pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kas dan Setara kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat *likuid* atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas dicatat sebesar nilai nominal.

- b) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Pendek dapat berupa Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.

- c) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai piutang yang belum dilunasi.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar nilai perolehan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

a) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi terdiri dari bantuan modal dalam bentuk dana bergulir.

b) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terdiri dari:

- (1) Penyertaan modal pemerintah daerah/ekuitas kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha lainnya milik negara
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- (3) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

3) Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan yang dikuasai. Aset Tetap terdiri dari:

- a) Tanah;
- b) Peralatan dan mesin;
- c) Gedung dan Bangunan;
- d) Jalan, irigasi dan jaringan;

- e) Aset tetap lainnya; dan
- f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Batas pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap adalah yang harga perolehan per unitnya sebesar Rp1.000.000,00. Batasan jumlah biaya untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap sebesar 5% dari nilai harga perolehan, sebagai penambahan nilai aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.

Biaya-biaya bersama non fisik dalam rangka memperoleh beberapa aset tetap yang harusnya menambah kapitalisasi masing-masing aset tetap belum diatur dalam kebijakan akuntansi sebagaimana teknik pendistribusiannya. Namun Pemerintah Daerah Kota Ternate melakukan atribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah belanja modal masing-masing kegiatan mengingat biaya-biaya tersebut memang seharusnya dikapitalisasi menambah aset-aset yang bersangkutan.

#### 4) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana Cadangan dan Lain-lain aset.

#### b. Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### 1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

- b) Kewajiban jangka pendek meliputi Bagian Lancar Utang Luar Negeri, Bagian Lancar Hutang kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya, Bagian Lancar Hutang kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan, Hutang Biaya Pinjaman (Denda, Biaya Administrasi dan Lain-Lain) dan Hutang atas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari:
  - (1) Hutang Luar Negeri;
  - (2) Hutang kepada Pemerintah Pusat;
  - (3) Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya;
  - (4) Hutang kepada BUMN/BUMD;
  - (5) Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan;
  - (6) Hutang Dalam Negeri Lainnya; dan
  - (7) Hutang Bunga.

c. Akuntansi Ekuitas Dana

Mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan pengungkapan ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

d. Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Seluruh pendapatan diakui pada saat diterima dan telah dibukukan pada Kas Daerah, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah dan telah diotorisasikan melalui pengesahan pihak yang berwenang.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate TA 2013 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Di dalam pelaksanaannya, apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media *adjustment* atau jurnal koreksi atas

pos-pos laporan keuangan, dan pada akhirnya semua pencatatan dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Aset Tetap yang belum dilakukan penyusutan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya belum dilaksanakan dengan baik dan benar, karena terbentur masalah sumber daya/aparatur yang masih belum memadai.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE TA 2013**

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran (TA) 2013 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

**5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca**

**5.1.1 Aset**

**1. Kas di Kas Daerah**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp11.519.434,00 dan Rp18.629.306,00. Saldo tersebut sama dengan saldo 5 (lima) Rekening Giro Bank yang dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh BUD pada TA 2013 untuk operasional penerimaan dan pengeluaran daerah. Rekening giro sebagaimana dalam rincian dibawah ini:	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	<b>11.519.434,00</b>	<b>18.629.306,00</b>

No	Rekening Giro	Nilai (Rp)
1	Bank Maluku Rek 0601022001	10.543.981,00
2	Bank Maluku Rek 0601002024	0,00
3	Bank Maluku Rek 0601002034	0,00
4	Bank Maluku Rek 0601002014	0,00
5	BNI Rek 0086130053	975.453,00
	Jumlah	11.519.434,00

Selain 5 rekening tersebut, BUD juga memiliki dan menguasai Rekening Giro Bank Maluku dengan nomor rekening 0601002044 yang dipergunakan untuk menampung retur pengiriman uang yang dikembalikan oleh bank lain pada saat kliring, dikarenakan kesalahan input nama dan nomor rekening penerima pada SP2D. Saldo rekening giro tersebut per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp604.798.638,00. Saldo rekening retur disajikan secara *extracomptable*, dikarenakan merupakan rekening dalam penguasaan BUD, tetapi bukan

merupakan bagian dari Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2013. Pengiriman kembali uang, dilakukan oleh Bank Maluku berdasarkan surat pemberitahuan dari BUD mengenai pembetulan nama dan nomor rekening yang seharusnya. Atas jasa giro rekening, sudah dicatat sebagai penerimaan daerah.

*Rincian perhitungan Saldo Kas di Kas Daerah dalam Lampiran 1.*

## 2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp314.260.712,00 dan Rp311.040.481,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan hasil konsolidasi dari seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini:

31 Desember 2013      31 Desember 2012  
**314.260.712,00**      **311.040.481,00**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	24.353.843,00
2	Dinas Kesehatan	23.486.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	73.002,00
4	Bappeda	18.579.954,00
5	Dinas Perhubungan	5.882.268,00
6	Kantor Keluarga Berencana	67.109.142,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	48.560.251,00
8	Sekretariat Daerah	44.633.554,00
9	DPPKAD	13.055.400,00
10	Kec. Ternate Tengah	363.687,00
11	Kec. Batang Dua	1.235.000,00
12	Kec. Hiri	18.926.462,00
13	Kantor Arsip	234.604,00
15	Dinas Pertanian	14.933.140,00
16	BP4K	1.372.517,00
17	Dinas Perikanan dan Kelautan	89.800,00
18	Dinas Pasar	31.371.188,00
JUMLAH		314.260.712,00

Atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp314.260.712,00, sebesar Rp269.653.958,00 merupakan sisa UP dan sebesar Rp44.606.754,00 merupakan utang PFK SKPD. Atas saldo sisa UP tersebut, pada saat pemeriksaan dilakukan, sudah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp183.618.354,00, sedangkan yang belum menyetorkan UP ke Kas Daerah adalah Bendahara Pengeluaran SKPD Kantor Keluarga Berencana sebesar Rp67.109.142,00 dan SKPD Kecamatan Hiri sebesar Rp18.926.462,00. Atas saldo PFK SKPD tersebut, pada saat pemeriksaan



dilakukan, Bendahara Pengeluaran DPKAD dan Dinas Perhubungan dan Kominfo telah menyampaikan SSP sebagai bukti sudah menyetorkan PFK ke Kas Negara sebesar Rp13.225.846,00. Sedangkan, SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp454.545,00 dan Dinas Pasar belum menyetorkan pajak ke Kas Negara sebesar Rp30.926.363,00.

Rincian perhitungan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam *Lampiran 2*.

### 3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp9.400.000,00 dan Rp0,00. Kas tersebut masih berada di bendahara penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Bendahara penerimaan yang belum menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah tersebut adalah bendahara penerimaan SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Atas saldo kas tersebut, sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2014.

<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
<b>9.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian perhitungan saldo kas di Bendahara Penerimaan dalam *Lampiran 3*.

### 4. Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp31.017.900,00 dan Rp3.297.382.225,00. Jumlah tersebut adalah Piutang Pajak Restoran, yang merupakan sisa kurang bayar atas pajak restoran Sari Bundo sebesar Rp131.017.900,00. Sampai dengan TA 2013, SKPDKB yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan adalah senilai Rp100.000.000,00, dan atas SKPDKB tersebut, restoran Sari Bundo telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp100.000.000,00. SKPDKB sebesar Rp31.017.900,00 (Rp131.017.900,00 – Rp100.000.000,00) belum diterbitkan

<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
<b>31.017.900,00</b>	<b>3.297.382.225,00</b>

## 5. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp6.149.976.101,00 dan Rp948.953.380,00.

31 Desember 2013

31 Desember 2012

**6.149.976.101,00**

**948.953.380,00**

Saldo tersebut merupakan piutang dana transfer dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang diperoleh berdasarkan perhitungan selisih antara alokasi Pajak Bagi Hasil Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA 2013, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah sebesar Rp11.541.708.329,00, dibandingkan dengan realisasi nilai transfer bagi hasil TA 2013 dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima di Kas Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp5.391.732.228,00.

Rincian Perhitungan dalam *Lampiran 4*.

## 6. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.653.787.166,00 dan Rp2.241.476.721,00.

31 Desember 2013

31 Desember 2012

**3.653.787.166,00**

**2.241.476.721,00**

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Nilai persediaan dicatat berdasarkan Berita Acara Stock Opname per 31 Desember 2013 yang dibuat oleh masing-masing SKPD, dan tercatat pada Neraca SKPD dengan rincian nilai sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	980.000,00
2.	Dinas Kesehatan	2.535.184.768,00
	a. Puskesmas Siko	79.882.651,00
	b. Puskesmas Kalumpang	23.619.539,00
	c. Puskesmas Kalumata	17.062.359,00
	d. Diabetes Center	11.228.694,00
	e. Puskesmas Gambesi	16.248.766,00
	f. Puskesmas Jambula	10.134.494,00
	g. Puskesmas Kota Ternate	54.423.721,00
	h. Puskesmas Mayau	7.810.279,00
	i. Puskesmas Hiri	9.583.632,00
	j. Puskesmas Moti	20.810.469,00
	k. Puskesmas Sulamadaha	7.097.894,00
3.	Bappeda	452.600,00
4.	BLH	126.000,00
5.	Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan	224.000,00
6.	Kec. Pulau Ternate	100.900,00
7.	Kantor Kesbang Pol	275.000,00
8.	DPKAD	3.661.500,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
9.	Inspektorat	1.102.000,00
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	605.341.300,00
11.	Dinas Pariwisata	20.000,00
12.	Dinas Catatan Sipil	16.015.000,00
13.	Dinas Pendapatan	232.334.100,00
14.	Dinas Pasar	67.500,00
	Jumlah	3.653.787.166,00

Rincian perhitungan Saldo persediaan dalam *Lampiran 5*.

## 7. Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo Investasi non Permanen Lainnya per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp320.532.000,00 dan Rp1.057.002.450,00. Investasi non permanen lainnya tersebut berupa Dana Bergulir. Dana Bergulir adalah dana yang disalurkan Pemerintah Kota Ternate dalam rangka penguatan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dana tersebut disalurkan melalui anggaran pengeluaran pembiayaan.

31 Desember 2013

**320.532.000,00**

31 Desember 2012

**1.057.002.450,00**

Nilai perolehan Dana Bergulir Pemerintah Kota Ternate adalah sebesar Rp3.106.000.000,00, yang berasal dari APBD Kota Ternate TA 2002 sampai dengan TA 2009 dengan rincian sebagai berikut:

TA	Realisasi (Rp)
2002	435.900.000,00
2003	727.500.000,00
2004	487.600.000,00
2005	365.000.000,00
2006	400.000.000,00
2007	-
2008	300.000.000,00
2009	390.000.000,00
2010	-
2011	-
Jumlah	3.106.000.000,00

Sejak TA 2010, Pemerintah Kota Ternate belum menambah investasinya lagi. Pengelolaan Dana Bergulir ini seluruhnya diserahkan kepada pengelola dana bergulir. Rincian dana berdasarkan pengelola dana bergulir adalah sebagai berikut:

Pengelola Dan Bergulir	Nilai (Rp)
BRI	435.900.000,00
KSU Makugawene	2.470.100.000,00
ISAP	20.000.000,00
BKCSK/PKK	150.000.000,00
LEPP-M3	30.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00

Laporan dana bergulir Tahun 2013 sesuai Surat Nomor 518/63/KUKM-KT/IV/2014 tanggal 8 April 2014 diperoleh informasi bahwa pengelola dana bergulir telah melakukan perguliran dana kepada para debitur, baik dari dana yang diperoleh dari APBD, maupun dana yang berasal dari pengembalian debitur (perguliran). Posisi per 31 Desember 2013, nilai realisasi dana bergulir dan nilai piutang yang belum dibayar para debitur dapat ditunjukkan sebagai berikut:

No	Pengelola Dana Bergulir	Nilai Realisasi Dana Bergulir	Nilai Piutang (Dana di debitur)
1	BRI	527.000.000,00	378.772.250,00
2	KSU Makugawene	3.453.400.000,00	2.049.012.924,00
3	PKK/BKCSK	151.850.000,00	151.850.000,00
4	ISAP	20.000.000,00	20.000.000,00
5	LEPP-M3	30.000.000,00	30.000.000,00
		4.182.250.000,00	2.629.635.174,00

Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir, yang menentukan klasifikasi ketertagihan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir sebagai berikut:

- a. Dapat ditagih, jika umur piutang 1-2 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- b. Diragukan dapat ditagih, jika umur piutang 2-3 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman
- c. Tidak dapat ditagih, jika umur piutang lebih dari 3 tahun dari jadwal jatuh tempo pinjaman.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dari total nilai dana di debitur sebesar Rp2.629.635.174,00, setelah dilakukan perbandingan umur piutang per debitur, diketahui nilai dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar piutang dana bergulir yang dapat ditagih, yaitu sebesar Rp320.532.000,00.

Rincian debitur dana bergulir dan penentuan klasifikasi umur piutang dalam *Lampiran 6*.

## 8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) Kota Ternate per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp36.891.534.015,00 dan Rp20.900.281.701,00.	<u>31 Desember 2013</u> <b>36.891.534.015,00</b>	<u>31 Desember 2012</u> <b>Rp20.900.281.701,00</b>
---	---	---

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan. Sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate ini disusun, BUMD yang kepemilikan Pemerintah Kota Ternate mencapai 50% ke atas, hanya bisa memberikan laporan keuangan yang belum *audited*.

Metode yang digunakan yaitu Metode Ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan pada PDAM, PD Citra Gamalama dan PT BPR Syariah Bahari Berkesan. Sedangkan Penyertaan Modal pada PT Bank Maluku menggunakan Metode Biaya (*Cost Method*). Rincian perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah daerah per BUMD sebagai berikut:

(a) PT Bank Maluku

Investasi berupa penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku terdiri atas 400 lembar saham PT Bank Maluku (Nomor A BM. 0016501 s.d 0016900) dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT BPDM	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	500.000.000,00
5	Penambahan Tahun 2012	500.000.000,00
6	Penambahan Tahun 2013	500.000.000,00
	Jumlah	3.000.000.000,00

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku kurang dari 20%, dan Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan kurang dari 20%, dicatat menggunakan metode biaya. Dengan demikian, nilai PMPD pada PT Bank Maluku adalah sebesar Rp3.000.000.000,00.

(b) PD Citra Gamalama

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PD Citra Gamalama adalah sebesar 100%. Nilai penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan TA 2013 adalah sebesar Rp1.773.959.676,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal PD Citra Gamalama	Nilai (Rp)
Sampai dengan 2005	750.000.000,00
Penambahan Tahun 2006	250.000.000,00
Penambahan Tahun 2008	500.000.000,00
Penambahan Tahun 2009	150.000.000,00
Penambahan Tahun 2011	297.000.000,00
Penerimaan Hibah	93.000.000,00
Penambahan Tahun 2013	1.829.600.000,00
Jumlah Penyetoran Modal	3.869.600.000,00
Akumulasi Laba (Kerugian) s/d 2013	(2.095.640.324,00)
Jumlah Ekuitas Pemkot Ternate	1.773.959.676,00

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan lebih dari 50%, dicatat menggunakan metode ekuitas. Dengan demikian, nilai PMPD Kota Ternate pada PD Citra Gamalama dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa penyertaan modal PD Citra Gamalama sebesar Rp1.773.959.676,00

(c) PDAM

Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kota Ternate untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 (*unaudited*), jumlah modal yang tercatat adalah sebesar Rp25.858.115.454,00. Modal tersebut terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.173.890.154,00, modal hibah sebesar Rp148.480.200,00 dan modal yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp24.535.745.100,00. Dalam Laporan Keuangan PDAM, tercatat akumulasi laba/(rugi) sampai dengan Tahun Buku 2013 adalah sebesar

Rp932.784.779,59. Dengan demikian, Ekuitas Pemerintah Kota Ternate atas penyertaan modal pada PDAM (dengan pembulatan) sebesar Rp26.790.900.233,00 (Rp25.858.115.454,00 + Rp932.784.779,59)

(d) BPR Syariah Bahari Berkesan

PT BPR Syariah Bahari Berkesan didirikan berdasarkan Akta Notaris Tatiek Nurdjanti, S H, Nomor 48 tanggal 27 Desember 2011. Dalam akta tersebut dinyatakan nama lengkap perusahaan ini adalah PT Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bahari Berkesan atau disingkat PT BPRS Bahari Berkesan. Berdasarkan Surat Nomor 012/DIR/BPRS-BB/I/2014 tanggal 20 Januari 2014, diketahui bahwa nilai susunan Modal Disetor pemilik kepada PT BPRS Bahari Berkesan berdasarkan RUPS, semula Rp3.010.000.000,00 telah berubah menjadi sebesar Rp5.515.000.000,00 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Saham (lembar)	Nominal (Rp)	Prosentase
1	Pemerintah Kota Ternate	5.250	5.250.000.000,00	95,20%
2	Ir. Arifin Djafar	20	20.000.000,00	0,36%
3	Hj Nursia Abdul Haris	95	95.000.000,00	1,72%
4	Muhammad Hasan Bay	150	150.000.000,00	2,72%
	Total	5.515	5.515.000.000,00	100,00%

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Syariah Bahari Berkesan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 (*unaudited*), jumlah modal disetor yang tercatat, telah sama dengan hasil RUPS, yaitu sebesar Rp5.515.000.000,00, dengan kepemilikan Pemerintah Kota sebesar Rp5.250.000.000,00 atau 95,20%.

Pemerintah Kota Ternate sampai dengan TA 2013, telah melakukan pengeluaran pembiayaan dari APBD, untuk operasional persiapan pendirian PT BPRS Bahari Berkesan dan penyetoran modal sebesar Rp6.300.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
11-Mar-11	01044/2011	500.000.000,00
1-Jul-11	03517/2011	100.000.000,00
6-Jul-11	03624/2011	32.000.000,00
13-Oct-11	09038/2011	68.000.000,00
21-Nov-11	09992/2011	200.000.000,00
9-Dec-11	10636/2011	900.000.000,00
18-Jan-12	00097/SP2D	1.035.000.000,00
14-Peb-12	00401/SP2D	150.000.000,00
03-Apr-12	01606/SP2D	65.000.000,00
11-Mei-12	02167/SP2D	1.000.000.000,00
5 Maret 2013	00935/SP2D	1.250.000.000,00
7 Maret 2013	01015/SP2D	1.000.000.000,00
Jumlah		6.300.000.000,00

Dengan demikian terdapat selisih pencatatan pengakuan antara nilai penyertaan bidang Akuntansi DPKAD dengan Direksi PT BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp1.050.000.000,00 (Rp6.300.000.000,00 – Rp5.250.000.000,00). Nilai pengeluaran pembiayaan sebesar selisih tersebut merupakan biaya operasional persiapan pendirian PT BPRS Bahari Berkesan yang diterima dan dikelola oleh Tim Persiapan Pendirian PT BPRS Bahari Berkesan, sehingga bukan merupakan bagian dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate.

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Bahari Berkesan adalah sebesar 95,20% atau diatas 50%. Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Ternate, sesuai Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008, atas kepemilikan lebih dari 50%, dicatat menggunakan metode ekuitas.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Syariah Bahari Berkesan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 (*unaudited*), nilai akumulasi laba/(rugi) sampai dengan Tahun Buku 2013 adalah sebesar Rp80.245.910,70. Berdasarkan data tersebut, total nilai ekuitas PT BPRS Bahari Berkesan adalah Rp5.595.245.910,70 (Rp5.515.000.000,00 + Rp80.245.910,70). Dengan demikian, nilai ekuitas Pemerintah Kota Ternate pada PT BPRS Bahari Berkesan adalah sebesar porsi kepemilikan Pemerintah Kota Ternate dikalikan total nilai ekuitas perusahaan atau sebesar Rp5.326.674.106,00 (95,20% x Rp5.595.245.910,70).

Laporan Keuangan BUMD dalam *Lampiran 7*.

## 9. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.380.785.222.322,00 dan Rp1.264.933.900.381,00.	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	<b>1.380.785.222.322,00</b>	<b>1.264.933.900.381,00</b>

Aset tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut:

▪ Tanah	Rp	236.669.101.791,00
▪ Peralatan dan Mesin	Rp	116.753.271.980,00
▪ Gedung dan Bangunan	Rp	503.928.081.150,00
▪ Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	461.830.900.957,00
▪ Aset Tetap Lainnya	Rp	11.473.038.280,00
▪ Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	50.130.828.164,00
Jumlah Sub	Rp	<b>1.380.785.222.322,00</b>



Rincian Aset Tetap per SKPD dalam *Lampiran 8*.

Saldo Aset tetap tersebut termasuk Aset Milik eks Kabupaten Maluku Utara (sekarang Halmahera Barat) yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Ternate senilai Rp13.880.215.370,00. Pencatatan aset tersebut belum disertai berita acara penyerahan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Secara substansi, dasar pencatatan sudah dapat dilakukan, mengingat Pemerintah Halmahera Barat sudah tidak mencatat aset tersebut dalam Neraca-nya.

Penjelasan atas mutasi penambahan aset tetap dari belanja modal TA 2013 dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2012 per jenis aset adalah sebagai berikut:

### 1) Tanah

Mutasi Aset Tetap Tanah selama TA 2013 adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir per 31-12-2013	Rp	228.767.057.041,00
Penyesuaian atas Saldo Awal	Rp	(5.000.000,00)
Saldo Awal per 01-01-2013	Rp	228.762.057.041,00
Penambahan 2013	Rp	7.902.044.750,00
<b>Saldo per 31-12- 2013</b>	<b>Rp</b>	<b>236.669.101.791,00</b>

Penambahan aset tetap tanah diperoleh dari Belanja Modal 2013 sebesar Rp 7.902.044.750,00.

Saldo Awal Per 31 Desember 2013 senilai 228.762.057.041,00 sudah termasuk bertambah belanja modal Tahun 2013 sebesar Rp7.902.044.750,00 adalah nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate berupa tanah kosong/lapangan, tanah di bawah bangunan, tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.

Nilai tanah ditetapkan berdasarkan harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak ditemukan maka digunakan wajar.

Pencatatan atas tanah senilai Rp236.669.101.791,00 merupakan pencatatan atas tanah hak milik, hak pakai dan hak guna pakai/pengelolaan yang terdiri dari 597 Bidang tanah seluas 1.191.495 m<sup>2</sup>, Hak kepemilikan tanah berupa sertifikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Bidang Tanah	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Rp	Nilai
Tanah yang telah memiliki sertifikat	82	300.476	Rp	70.700.125.460,00
Tanah yang Belum memiliki Sertifikat	515	903.992	Rp	165.968.976.331,00
<b>Jumlah</b>	<b>597</b>	<b>1.204.468</b>	<b>Rp</b>	<b>236.669.101.791,00</b>

Proses sertifikasi tanah akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

## 2) Peralatan dan Mesin

Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2013 sebesar Rp116.753.271.980,00 yang terdiri dari:

### (1) Alat-alat Berat

Alat-alat Berat merupakan nilai Alat-alat Berat per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 10.233.688.505,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 1.009.112.000,00</u>
Jumlah	Rp 11.242.800.505,00

### (2) Alat-alat Angkutan

Alat-alat Angkutan merupakan nilai Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 37.245.358.981,00
- Koreksi berkurang atas dobel pencatatan Mutasi ke SKPD Lain	Rp 12.081.000,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 4.269.424.436,00</u>
Jumlah	Rp 41.502.702.417,00

### (3) Alat-alat Bengkel

Alat-alat Bengkel merupakan nilai Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 705.054.603,00
- Koreksi Berkurang atas usulan penghapusan	Rp 97.920.000,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 218.340.500,00</u>
Jumlah	Rp 825.475.103,00

### (4) Alat-alat Pertanian dan Peternakan

Alat-alat Pertanian dan Peternakan merupakan nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 726.458.250,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp1.856.960.000,00</u>
Jumlah	Rp2.583.418.250,00

### (5) Alat-alat Kantor dan RumahTangga

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan nilai Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp32.566.501.457,00
- Koreksi Berkurang atas Perpindahan Pos	Rp 95.421.940,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 6.318.893.092,00</u>
Jumlah	Rp38.789.972.610,00

(6) Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio dan Komunikasi merupakan nilai Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp2.103.197.099,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 595.093.300,00</u>
Jumlah	Rp2.698.290.399,00

(7) Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Kedokteran merupakan nilai Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp5.695.396.843,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 313.657.670,00</u>
Jumlah	Rp6.009.054.473,00

(8) Alat-alat Laboratorium

Alat-alat Laboratorium merupakan nilai Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp10.497.363.412,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 2.579.219.810,00</u>
Jumlah	Rp13.076.583.222,00

(9) Alat-alat Keamanan

Alat-alat Keamanan merupakan nilai Alat-alat Keamanan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo Awal 1 Januari 2013	Rp0,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp24.975.000,00</u>
Jumlah	Rp24.975.000,00

**3) Gedung dan Bangunan**

Merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2013 sebesar Rp503.928.081.150,00 yang terdiri dari:

(1) Bangunan dan Gedung

Bangunan Gedung merupakan nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp436.414.782.228,00
- Penyesuaian atas Pergeseran Bertambah atas Pemindahbukuan Pengadaan Asset Bangunan Gedung Sekretariat Daerah dll.	
	<u>Rp 66.153.561.922,00</u>
Jumlah	Rp502.568.344.150,00

(2) Bangunan Monumen

Bangunan Monumen merupakan nilai Bangunan Monumen per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 599.633.000,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 760.104.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.359.737.000,00

**4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi**

Merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2013 sebesar Rp461.830.900.957,00 yang terdiri dari:

(1) Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan merupakan nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 343.323.327.967,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 37.837.346,258,00</u>
Jumlah	Rp 381.160.674.225,00

(2) Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air (Irigasi) merupakan nilai bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp50.771.385.323,00
- Penyesuaian berkurang atas Pergeseran Aset Bangunan Air (Irigasi)	(Rp 256.425.000,00)
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 2.004.146.350,00</u>
Jumlah	Rp52.519.106.673,00

(3) Instalasi

Instalasi merupakan nilai Instalasi per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp6.050.871.387,00
- Penyesuaian berkurang atas Aset Instalasi Jaringan	

	(Rp989.392.250,00)
Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp1.083.576.000,00</u>
Jumlah	Rp6.145.055.137,00

(4) Jaringan

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp19.426.688.310,00
- Penyesuaian berkurang atas pergeseran Aset Jaringan	(Rp 94.500.000,00)
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 2.673.876.614,00</u>
Jumlah	Rp 22.006.064.924,00

**5) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.473.038.280,00, terdiri dari:

(1) Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp 9.980.987.180,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 456.919.100,00</u>
Jumlah	Rp10.437.906.280,00

(2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan merupakan nilai barang bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo Awal 1 Januari 2013	<u>Rp222.125.800,00</u>
- Jumlah	Rp222.125.800,00

(3) Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan merupakan nilai Hewan/Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo Awal 1 Januari 2013	Rp 34.214.000,00
- Realisasi Berkurang (terlampir)	Rp (29.931.000,00)
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp 5.670.000,00</u>
Jumlah	Rp 9.953.000,00

(4) Lain - Lain

Aset Lain-lain berupa aplikasi software dan lain-lain, per 31 Desember 2013 yang terdiri dari:

- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp519.689.000,00
- Realisasi berkurang	Rp -
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	<u>Rp283.364.200,00</u>
Jumlah	Rp803.053.200,00

#### 6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya per 31 Desember 2013 yang terdiri dari :

- Saldo Akhir 31 Desember 2012	Rp68.842.387.033,00
- Penyesuaian saldo awal KDP	(Rp108.848.100,00)
- Saldo awal 1 Januari 2013	Rp68.733.538.933,00
- Realisasi Belanja Modal TA 2013	Rp15.558.518.071,00
- Penyesuaian Berkurang Aset KDP	<u>(Rp34.161.228.840,00)</u>
Jumlah	Rp50.130.828.164,00

Rincian Konstruksi Dalam Pekerjaan adalah sebagai berikut :

NO.	DESKRIPSI	NILAI (Rp.)
1	<b>Dinas Pekerjaan Umum</b>	
	Survey dan Investigasi Pemb. Jalan Pantai Kota baru Bastiong	97.600.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I	3.567.690.000
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	159.840.000
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	119.600.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I (DIPD-L)	3.282.710.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	848.160.000
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	143.600.000
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	78.740.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II (DIPD-L)	2.127.840.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III	2.214.550.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III (DIPD-L)	5.545.450.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap IV (MY)	240.000.000
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap V (MY)	1.423.910.000
	Jalan Kelurahan Makassar Timur	770.860.000
	Jalan Kelurahan Makassar Timur (DIPD-L)	243.430.000
	Jalan/Penataan Kelurahan Makassar Timur Tahap II	200.000.000
	Pemb. Jalan Kel. Kampung Makassar Timur Kota Ternate	1.333.338.000
	Pengawasan Teknis Pemb. Jalan Kel. Kampung Makassar Timur	37.491.300
	Perenc. Teknis Pemb. Jalan Kota Baru – Bastiong	174.240.000
	Jl. Dufa-Dufa Beach	1.714.789.812
	Talud Daulasi / Pengaman Badan Jalan_ Jl. Dufa-Dufa Beach	599.590.000
	Rehab Talud Penahan Ombak Kel. Dufa-dufa_Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	855.000.000
	Rehabilitasi Talud Penahan Ombak Dufa-dufa (DIPDA-L)_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	676.590.000
	Rehab & Rekonstruksi Talud Penahan Ombak Kel.Dufa Dufa_ Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	719.650.000
	Rehab & Kontruksi Talud Penahan Ombak Nyare Madehe _Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	620.350.000
	Rehab dan Kontruksi Talud Penahan Ombak Kel. Dufa - Dufa ( DPAL )_Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	795.410.000
	Talud dan Timbunan Nyaremadehe Dufa- Dufa_Jl. Dufa-Dufa Beach (Nyare Madehe)	1.734.240.000
	Gedung TASBAQ	949.975.000

NO.	DESKRIPSI	NILAI (Rp.)
	Jalan Pantai Kotabaru-Bastiong (Lanjutan)	8.147.490.000
	Landmark Kota Ternate	2.928.680.000
	Perencanaan Teknis Ruko Kel Soa Sio	84.100.000
	Perencanaan Teknis Pembangunan Ruko Utara dan Selatan II	73.000.000
	Perencanaan Teknis Pasar Sasa	42.600.000
	Sub Total	<b>42.550.514.112</b>
<b>2</b>	<b>Kecamatan Batang Dua</b>	
	Reahab & penataan halaman Kantor Camat	362.645.201
	Pembangunan Aula Serba Guna	430.700.000
	Sub Total	<b>793.345.201</b>
<b>3</b>	<b>KDP di Dinas Pendidikan Nasional</b>	<b>6.786.968.851</b>
	<b>Total</b>	<b>50.130.828.164</b>

## 10. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 sebesar Rp23.617.317.908,00 direklasifikasi per sub akun menjadi Tuntutan Perbendaharaan, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain. Sedangkan Saldo Aset Lainnya dalam Neraca per 31 Desember 2012 yaitu sebesar Rp23.150.317.987,00, semuanya dicatat sebagai Aset Lain-lain. Penjelasan saldo per sub akun sebagai berikut:

### 1) Tuntutan Perbendaharaan

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp941.037.426,00 dan Rp0,00.	<u>31 Desember 2013</u>	<u>31 Desember 2012</u>
	<b>941.037.426,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan nilai kerugian daerah yang ditimbulkan kelalaian Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Umum Daerah (BUD). TP atas nama BUD adalah penyetoran ganda ke Kas Negara atas pajak rekanan yang terjadi pada periode TA 2009 – 2011. Rincian Saldo Tuntutan Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Tuntutan Perbendaharaan	Nilai (Rp)
1	Kas yang dicuri TA 2011 di SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	105.581.293,00
2	Kas yang dicuri pada TA 2011 di SKPD Kecamatan Ternate Selatan	64.260.008,00
3	Penggunaan uang belanja untuk kepentingan pribadi di SKPD Kecamatan Ternate Tengah	154.050.000,00
4	Penggunaan uang belanja TA 2011 untuk kepentingan pribadi an. Manta, Bendahara SKPD Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi	243.658.266,00
5.	Kelebihan Penyetoran ke Kas Negara dikarenakan penyetoran pajak atas PPN dan PPh pajak rekanan TA 2009 – TA 2011 yang dibayar dua kali (ganda). Sudah disertai dengan SKTJM an MTS (BUD TA 2009- 2011) dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 377	373.487.859,00
	Jumlah	941.037.426,00

## 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp3.350.000.000,00 dan Rp0,00.

Saldo tersebut berupa Aset dengan Hak Pengelolaan milik Pemerintah Kota Ternate berdasarkan Hak 68 No.1/Kelurahan Kayu Merah yang dikeluarkan oleh BPN Kota Ternate tanggal 1 Juli 1985 seluas 26.165 m<sup>2</sup>, yang dimanfaatkan oleh PT. Indoteranusa untuk Pembangunan Wahana Wisata Ternate Park.

## 3) Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp19.326.280.483,00 dan Rp23.150.317.987,00. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Barang yang tidak diklasifikasikan sebagai aset tetap yang diketahui keberadaannya	5.206.265,00
2.	Barang yang hilang	17.461.186,00
3.	Barang dengan kategori rusak berat	1.845.836.774,00
4.	Barang dengan kategori rusak ringan	3.115.000,00
5.	Barang yang tidak diketahui keberadaannya	17.454.661.258,00
	Jumlah	19.326.280.483,00

Rincian Aset Lain-lain dalam *Lampiran 9*.

Aset lain-lain merupakan hasil reklasifikasi dari aset tetap dengan kondisi seperti tersebut di atas, dan akan segera diproses untuk ditetapkan statusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 5.1.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp18.147.844.429,00 dan Rp14.905.680.015,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Penjelasan lebih lanjut Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp18.147.844.429,00 dan Rp14.905.680.015,00, terdiri dari:



No.	Uraian	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
1	Utang PFK	18.147.844.429,00	14.743.468.952,00
2	Utang Belanja	-	-
3	Utang Jangka Pendek lainnya	-	162.211.063,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.147.844.429,00</b>	<b>14.905.680.015,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan Utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Kewajiban Jangka Pendek berupa utang PFK per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp18.147.844.429,00 dan Rp14.743.468.952,00 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2013 (Rp)	31 Desember 2012 (Rp)
	<b>BUD</b>		
1	PFK dari SP2D LS Barang Jasa	11.471.100.087,00	7.772.302.039,00
2	PFK dari SP2D LS Gaji dan Tunjangan	6.618.055.818,00	6.939.453.171,00
3	Koreksi Saldo Awal PPN/PPh Barjas	14.081.770,00	-
	<b>Jumlah PFK BUD</b>	<b>18.103.237.675,00</b>	<b>14.711.755.210,00</b>
	<b>SKPD</b>		
1	Dinas Pariwisata	454.545,00	454.545,00
2	DPPKAD	13.055.400,00	19.636.500,00
3	Dinas Perdagangan	-	9.478.978,00
4	Kecamatan Ternate Utara	-	1.973.273,00
5	Dinas Perhubungan	170.446,00	170.446,00
6	Dinas Pasar	30.926.363,00	-
	<b>Jumlah PFK SKPD</b>	<b>44.606.754,00</b>	<b>31.713.742,00</b>
	<b>JUMLAH (BUD + SKPD)</b>	<b>18.147.844.429,00</b>	<b>14.743.468.952,00</b>

Rincian Perhitungan PFK dalam *Lampiran 10*.

Koreksi Saldo Awal disebabkan kesalahan pencatatan oleh Bidang Akuntansi pada Laporan Keuangan Tahun 2012 yang disebabkan:

- 1) Terjadi 2 kali pengurangan potongan SP2D Batal pada daftar penguji yang mengurangi nilai PFK sebesar (Rp5.175.000,00);
- 2) Kesalahan pencatatan PFK sebesar (Rp9.000,00) pada tanggal 2 Oktober 2012;
- 3) Terjadi kurang catat PFK sebesar PFK sebesar Rp759.346,00 pada tanggal 4 November 2012;
- 4) Terjadi 2 kali pengurangan potongan IMB pada daftar penguji yang mengurangi nilai PFK sebesar (Rp9.630.000,00);
- 5) Selisih kurang sebesar (Rp27.116,00) merupakan akumulasi dari kelebihan/kekurangan setor PFK pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rincian Utang PFK BUD sebesar Rp18.103.237.675,00 tersebut, diantaranya adalah kelebihan setor PFK ke Kas Negara sebesar Rp11.305.465,00 yang terjadi dalam Tahun 2013. Atas permasalahan tersebut telah disertai dengan

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atas Nama DR, BUD TA 2013, dengan jaminan BPKB Nomor F.2189524.

Selain kelebihan pembayaran, juga terdapat kekurangan setor PFK sebesar Rp238,00. Lebih lanjut, dalam rincian utang PFK tersebut juga termasuk didalamnya PPh22 atas PNPB Mandiri sebesar Rp43.636.365,00 yang sudah dipungut pada TA 2009, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara.

### 5.1.3 Ekuitas Dana

#### 1. Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar minus Rp7.997.883.116,00 dan minus Rp8.088.197.902,00. Jumlah tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
1	SiLPA	(17.822.064.283,00)	(14.416.677.770,00)
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	9.400.000,00	2.878.605,00
3	Cadangan Piutang	6.180.994.001,00	4.246.335.605,00
4	Cadangan Persediaan	3.653.787.166,00	2.241.476.721,00
5	DYHD Utang Jangka Pendek	-	( 162.211.063,00)
	Jumlah	(7.977.883.116,00)	(8.088.197.902,00)

#### 2. Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.441.614.606.245,00 dan Rp1.310.041.502.519,10 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2013 (Rp)	Per 31 Desember 2012 (Rp)
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	37.212.066.015,00	21.957.284.151,00
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.380.785.222.322,00	1.264.933.900.381,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	23.617.317.908,00	23.150.317.987,00
	Jumlah	1.441.614.606.245,00	1.310.041.502.519,00

## 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

### 5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate TA 2013 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut: Pendapatan Daerah TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp633.476.267.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik sebesar Rp14.737.100.000,00 atau menjadi Rp648.213.367.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp646.699.626.570,00 atau 99,77%, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1.513.740,430,00 atau 0,23%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp40.572.363.457,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp606.008.253.543,00 sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp119.009.570,00. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah TA 2012, realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp72.213.295.625,00 atau Rp12,57%.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah TA 2013 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

No	Jenis	Tahun Anggaran 2013			%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pendapatan Asli Daerah	41.435.000.000,00	43.535.000.000,00	40.572.363.457,00	93,19	32.907.344.834,00
2	Dana Transfer	591.781.267.000,00	604.418.367.000,00	606.008.253.543,00	100,26	538.753.914.271,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	260.000.000,00	260.000.000,00	119.009.570,00	45,77	2.825.071.840,00
	Jumlah	633.476.267.000,00	648.213.367.000,00	646.699.626.570,00	99,77	574.486.330.945,00

#### Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp41.435.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013 target tersebut naik Rp2.100.000.000,00 atau 5,07 % menjadi Rp43.535.000.000,00. Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 mencapai Rp40.572.363.457,00 atau 93,19% dari anggarannya. Realisasi PAD tersebut tidak capai target sebesar Rp2.962.636.543,00 atau 6,81%.

Apabila realisasi PAD TA 2013 dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2012 yang tercatat sebesar Rp32.907.344.834,00, PAD TA 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp7.665.018.623,00 atau 23,29%.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD TA 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Jenis	Tahun Anggaran 2013			%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pajak Daerah	19.590.000.000,00	20.500.000.000,00	21.586.741.654,00	105,30	17.989.070.701,00
2	Retribusi Daerah	14.481.000.000,00	15.671.000.000,00	12.765.797.677,00	81,46	10.066.416.034,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000,00	500.000.000,00	365.392.583,00	73,08	292.560.386,00
4	Lain-lain PAD	6.864.000.000,00	6.864.000.000,00	5.854.431.543,00	85,29	4.559.297.713,00
	Jumlah	41.435.000.000,00	43.535.000.000,00	40.572.363.457,00	93,19	32.907.344.834,00

### 1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2013 seperti tampak pada tabel tersebut di atas, realisasi pajak daerah telah melampaui target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Pajak Daerah TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp19.590.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013, target tersebut naik sebesar Rp910.000.000,00 atau 4,65% menjadi Rp20.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp21.586.741.654,00 atau 105,30% dari anggarannya, dengan demikian realisasi Pajak Daerah ada peningkatan pencapaian sebesar Rp1.086.741.654,00 atau 5,30%.

Apabila realisasi Pajak Daerah tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp17.989.070.701,00 maka terlihat pendapatan pajak di TA 2013 naik sebesar Rp3.597.670.953,00 atau 19,99%.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah TA 2013 digambarkan pada tabel berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
	<b>21.586.741.654,00</b>	<b>17.989.070.701,00</b>	<b>105,30</b>

No	Uraian	Tahun Anggaran 2013			%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1.	Pajak Hotel	1.550.000.000,00	1.650.000.000,00	1.660.736.344,00	100,65	1.463.166.702,00
2.	Pajak Restoran	3.150.000.000,00	3.350.000.000,00	3.858.617.958,00	115,18	3.307.846.633,00
3.	Pajak Hiburan	165.000.000,00	300.000.000,00	426.470.411,00	142,16	165.194.652,00
4.	Pajak Reklame	975.000.000,00	975.000.000,00	1.060.478.086,00	108,77	1.032.577.230,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	8.225.000.000,00	9.214.406.467,00	112,03	8.312.451.028,00
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.381.787.900,00	55,27	1.418.010.000,00
7.	Pajak Parkir	100.000.000,00	200.000.000,00	128.610.270,00	64,31	74.153.400,00
8.	Pajak Air Bawah Tanah	450.000.000,00	600.000.000,00	769.192.768,00	128,20	167.820.863,00
9.	BPHTB	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	3.086.441.450,00	114,31	2.047.850.193,00
	Jumlah	19.590.000.000,00	20.500.000.000,00	21.586.741.654,00	105,30	17.989.070.701,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2013 diuraikan sebagai berikut:

**a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp1.550.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013, target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00, atau menjadi Rp1.650.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp1.660.736.344,00 atau 100,65% dari anggaran yang ditetapkan. Dengan demikian, realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp10.736.344,00 atau 0,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.463.166.702,00 terlihat realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2013 naik sebesar Rp197.569.642,00 atau 13,50%.

**b. Pajak Restoran**

Pajak Restoran TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp3.150.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013, target tersebut naik sebesar Rp200.000.000,00 atau menjadi Rp3.350.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp3.858.617.958,00 atau 115,18%, dengan demikian, realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp508.617.958,00 atau 15,18%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran TA 2012 yang jumlahnya mencapai Rp3.307.846.633,00 maka terlihat realisasi Pajak Restoran TA 2013 naik sebesar Rp550.771.325,00 atau 16,65%.

**c. Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp165.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013 target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp135.000.000,00 atau menjadi Rp300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp426.470.411,00 atau 142,16 %, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan melampaui target sebesar Rp126.470.411,00 atau 42,16 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp165.194.652,00, terlihat realisasi Pajak Hiburan TA 2013 naik sebesar Rp261.275.759,00 atau 158,16 %.

**d. Pajak Reklame**

Pajak Reklame TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp975.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013 target tersebut tidak mengalami kenaikan anggaran, atau tetap sebesar Rp975.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp1.060.478.086,00 atau 108,77%, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp85.478.086,00 atau 8,77 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp1.032.577.230,00, terlihat realisasi Pajak Reklame TA 2013 naik sebesar Rp27.900.856,00 atau 2,70%.

**e. Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp8.000.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik sebesar Rp225.000.000,00 atau menjadi Rp8.225.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp9.214.406.467,00 atau 112,03%, dengan demikian realisasi penerimaan PPJ melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp989.406.467,00 atau 12,03%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PPJ TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.312.451.028,00 maka realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp901.955.439,00 atau 10,85%.

**f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013, target tersebut tidak mengalami perubahan nilai atau tetap sebesar Rp2.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp1.381.787.900,00 atau 55,27%, dengan demikian realisasi Pajak MBLB tidak mencapai target sebesar Rp1.118.212.100,00 atau 44,73%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak MBLB TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp1.418.010.000,00 terlihat

realisasi Pajak MBLB TA 2013 terjadi penurunan sebesar Rp36.222.100,00 atau 2,55%.

**g. Pajak Parkir**

Pajak Parkir TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013 target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau menjadi Rp200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp128.610.270,00 atau 64,31%, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak dapat mencapai target sebesar Rp71.389.730,00 atau 35,69%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp74.153.400,00 terlihat realisasi Pajak Parkir TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp54.456.870,00 atau 73,44%.

**h. Pajak Air Bawah Tanah**

Pajak Air Bawah Tanah TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 atau menjadi Rp600.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp769.192.768,00 atau 128,20%, dengan demikian realisasi Pajak Air Bawah Tanah telah melampaui target sebesar Rp169.192.768,00 atau 28,20 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Air Bawah Tanah TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp167.820.863,00 terlihat realisasi Pajak Air Bawah Tanah TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp601.371.905,00 atau 358,34%.

**i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2013 semula ditargetkan sebesar Rp2.700.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran TA 2013, target tersebut tidak mengalami perubahan. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp3.086.441.450,00 atau 114,31%, dengan demikian realisasi Pajak BPHTB melampaui target sebesar Rp386.441.450,00 atau 14,31 %.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak BPHTB TA 2012 yang jumlahnya tercatat Rp2.047.850.193,00 terlihat realisasi Pajak BPHTB TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.038.591.257,00 atau 50,72%.

**2. Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian	<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b>%</b>
	<b>12.765.797.677,00</b>	<b>10.066.416.034,00</b>	<b>81,46</b>

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah TA 2013 semula ditargetkan Rp14.481.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2013 target tersebut naik sebesar Rp1.190.000.000,00 atau menjadi Rp15.671.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp12.765.797.677,00 atau 81,46%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp2.905.202.323,00 atau 18,54%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah TA 2013 dibandingkan dengan realisasi TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.066.416.034,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp2.699.381.643,00 atau 26,81%.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah TA 2013 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2013			%
		Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Lebih / kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6(4:4)
I	Retribusi jasa umum	10.353.000.000,00	8.150.776.250,00	2.202.223.750,00	78,73
II	Retribusi Jasa Usaha	1.960.000.000,00	1.219.293.000,00	740.707.000,00	62,21
III	Retribusi Perizinan Tertentu	3.358.000.000,00	3.395.728.427,00	(37.728.427,00)	101,12
	Jumlah	15.671.000.000,00	12.765.797.677,00	2.905.202.323,00	81,46

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis Retribusi Daerah TA 2013 adalah sebagai berikut:

**a. Retribusi Jasa Umum**

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah



pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum TA 2013 dianggarkan sebesar Rp10.353.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp8.150.776.250,00 atau 78,73%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak dapat melampaui dari target perubahan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.202.223.750,00 atau 21,27%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2013 seperti terlihat pada tabel berikut:

No.	Jenis	Tahun 2013		%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
<b>I. Retribusi Jasa Umum</b>					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-		208.406.400,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.100.000.000,00	1.701.341.000,00	81,02	1.656.908.500,00
3	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	300.000.000,00	564.810.000,00	188,27	220.030.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.550.000.000,00	1.342.600.000,00	86,62	1.033.800.000,00
5	Retribusi Pasar	5.240.000.000,00	3.819.460.250,00	72,89	2.831.662.165,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	263.000.000,00	159.465.000,00	60,63	149.765.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	900.000.000,00	563.100.000,00	62,57	555.720.000,00
Jumlah		10.353.000.000,00	8.150.776.250,00	78,73	6.656.292.065,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum TA 2013 antara lain sebagai berikut:

**(a) Retribusi Pelayanan Kebersihan**

Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Dinas Kebersihan TA 2013 ditargetkan sebesar Rp2.100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp1.701.341.000,00 atau 81,02%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp398.659.000,00 atau 18,98%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.656.908.500,00, terlihat retribusi ini di TA 2013 naik sebesar Rp44.432.500,00 atau 2,68%.

**(b) Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil**

Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil TA 2013, ditargetkan sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp564.810.000,00 atau 188,27%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp264.810.000,00 atau 88,27%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil TA 2012 yang tercatat sebesar Rp220.030.000,00, penerimaan retribusi ini di TA 2013 naik sebesar Rp344.780.000,00 atau 156,69%.

**(c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika TA 2013, ditargetkan sebesar Rp1.550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp1.342.600.000,00 atau 86,62%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp207.400.000,00 atau 13,38%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2012 yang tercatat sebesar Rp1.033.800.000,00, realisasi retribusi tersebut pada TA 2013 naik sebesar Rp308.800.000,00 atau 29,87%.

**(d) Retribusi Pasar**

Retribusi Pasar pada Dinas Pasar TA 2013, ditargetkan sebesar Rp5.240.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp3.819.460.250,00 atau 72,89 %, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp1.420.539.750,00 atau 27,11%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar TA 2012 yang tercatat sebesar Rp2.831.662.165,00, realisasi retribusi tersebut pada TA 2013 naik sebesar Rp987.798.085,00 atau 34,88%.

**(e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika TA 2013 ditargetkan sebesar Rp263.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp159.465.000,00 atau 60,63%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat mencapai target sebesar Rp103.535.000,00 atau 39,37%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp149.765.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini pada TA 2013 naik sebesar Rp9.700.000,00 atau 6,47%.

**(f) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam**

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Pada Kantor Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp563.100.000,00 atau 62,57%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam tidak dapat mencapai target sebesar Rp336.900.000,00 atau 37,43%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam pada TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp555.720.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini pada TA 2013 naik sebesar Rp7.380.000,00 atau 1,32%.

## b. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha TA 2013 ditargetkan sebesar Rp1.960.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp1.219.293.000,00 atau 62,21%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp740.707.000,00 atau 37,79%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2013 disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2013		%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	6=(4/3)	7
	<b>II. Retribusi Jasa Usaha</b>				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000.000,00	68.760.000,00	13,22	377.320.320,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	99.638.000,00	332,13	-
3	Retribusi Jasa Terminal	550.000.000,00	392.400.000,00	71,35	385.400.000,00
4	Retribusi Penyedotan Kakus	85.000.000,00	23.950.000,00	28,18	19.550.000,00
6	Retribusi Potong Hewan	100.000.000,00	63.750.000,00	63,75	63.765.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	450.000.000,00	392.100.000,00	87,13	338.200.000,00
8	Retribusi Jasa Pelabuhan Laut	225.000.000,00	178.695.000,00	79,42	191.193.000,00
	Jumlah	1.960.000.000,00	1.219.293.000,00	62,21	1.375.428.320,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2013 antara lain sebagai berikut:

### (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2013, ditargetkan sebesar Rp520.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp68.760.000,00 atau 13,22 %, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp451.240.000.000,00 atau 86,78%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2012 yang tercatat sebesar Rp377.320.320,00, terlihat retribusi ini pada TA 2013 turun sebesar Rp308.560.320,00 atau 81,78%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja. Seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. Rincian realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah per SKPD dapat terlihat dalam tabel berikut:

<b>S K P D</b>	<b>Realisasi TA 2013 (Rp)</b>
Dinas Pekerjaan Umum	5.460.000,00
Dinas Kebersihan	40.250.000,00
Sekretariat Daerah	7.250.000,00
Dinas Pemuda dan Olahraga	15.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>68.760.000,00</b>

**(b) Retribusi Tempat Pelelangan**

Retribusi Jasa Tempat Pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2013, ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp99.638.000,00 atau 332,13%, dengan demikian realisasi retribusi ini secara signifikan dapat melampaui target sebesar Rp69.638.000,00 atau sebesar 232,13%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Tempat Pelelangan TA 2012 yang tercatat nihil, maka realisasi retribusi ini pada TA 2013 meningkat sebesar Rp99.638.000,00.

**(c) Retribusi Jasa Terminal**

Retribusi Jasa Terminal Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika TA 2013, ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp392.400.000,00 atau 71,35%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp157.600.000,00 atau sebesar 28,65%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal TA 2012 yang tercatat sebesar Rp385.400.000,00, terlihat realisasi retribusi ini pada TA 2013 naik sebesar Rp7.000.000,00 atau 1,82%.

**(d) Retribusi Penyedotan Kakus**

Retribusi Penyedotan Kakus pada Dinas Kebersihan TA 2013, ditargetkan sebesar Rp85.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp23.950.000,00 atau 28,18%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp61.050.000,00 atau sebesar 71,82%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus TA 2012 yang tercatat sebesar Rp19.550.000,00, terlihat realisasi retribusi ini pada TA 2013 naik sebesar Rp4.400.000,00 atau 22,51%.

**(e) Retribusi Rumah Potong Hewan**

Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan TA 2013, ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp63.750.000,00 atau 63,75%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp36.250.000,00 atau sebesar 36,25%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2012 yang tercatat sebesar

Rp63.765.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2013 turun sebesar Rp15.000,00 atau 0,02%.

**(f) Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2013, ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp392.100.000,00 atau 87,13%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp57.900.000,00 atau sebesar 12,87%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2012 yang tercatat sebesar Rp338.200.000,00, terlihat realisasi retribusi ini pada TA 2013 naik sebesar Rp53.900.000,00 atau 15,94 %. Rincian retribusi berdasarkan lokasi tempat pemungutan retribusi parkir adalah sebagai berikut:

Lokasi Parkir	Tahun 2013 (Rp)
Parkir Dalam Pelindo / Pelabuhan	23.600.000,00
Parkir Khusus Bandara	368.500.000,00
Jumlah	392.100.000,00

**(g) Retribusi Jasa Pelabuhan Laut**

Retribusi Jasa Pelabuhan Laut Pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika TA 2013, ditargetkan sebesar Rp225.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp178.695.000,00 atau 79,42%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp46.305.000,00 atau sebesar 20,58%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Pelabuhan Laut TA 2012 yang tercatat sebesar Rp191.193.000,00, terlihat realisasi retribusi ini pada TA 2013 turun sebesar Rp12.498.000,00 atau 6,54%.

**c. Retribusi Perizinan Tertentu**

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2013, ditargetkan sebesar Rp3.358.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp3.395.728.427,00 atau 101,12%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp37.728.427,00 atau 1,12%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2013 disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun anggaran 2013		%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	<b>II. Retribusi Perizinan Tertentu</b>				
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.700.000.000,00	2.112.433.236,00	124,26	894.008.974,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	1.100.000.000,00	917.535.331,00	83,41	934.122.675,00
3	Retribusi Izin Trayek	90.000.000,00	20.350.000,00	22,61	22.165.000,00
4	Retribusi Izin Rekreasi dan Hiburan Umum	-	-	0,00	171.009.000,00
5	Retribusi Izin Perikanan	120.000.000,00	241.045.860,00	200,87	13.390.000,00
6	Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Olah Raga	268.000.000,00	104.364.000,00	38,94	
7	Retribusi Tera/tera Ulang	50.000.000,00	-	0,00	-
8	Sumbangan Pihak Tiga	30.000.000,00	-	0,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3.358.000.000,00</b>	<b>3.395.728.427,00</b>	<b>101,12</b>	<b>2.034.695.649,00</b>

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2013 antara lain sebagai berikut:

**(a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

Retribusi IMB pada Dinas Tata Kota dan Pertamanan TA 2013, ditargetkan sebesar Rp1.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp2.112.433.236,00 atau 124,26%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp412.433.236,00 atau 24,26%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi IMB TA 2012 yang tercatat sebesar Rp894.008.974,00, retribusi ini pada TA 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp1.218.424.262,00 atau 136,29%.

**(b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian**

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian pada Sekretariat Daerah TA 2013, ditargetkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp917.535.331,00 atau 83,41%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp182.464.669,00 atau 16,59%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan/Keramaian TA 2012 yang tercatat sebesar Rp934.122.675,00 retribusi ini pada TA 2013 mengalami penurunan sebesar Rp16.587.344,00 atau 1,78%.

**(c) Retribusi Izin Trayek**

Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika TA 2013, ditargetkan sebesar Rp90.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp20.350.000,00 atau 22,61%, dengan demikian retribusi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp69.650.000,00 atau 77,39%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek TA 2012 yang tercatat sebesar Rp22.165.000,00, terlihat mengalami penurunan pada TA 2013 sebesar Rp1.815.000,00 atau 8,19%.

**(d) Retribusi Izin Perikanan**

Retribusi Izin Perikanan pada Dinas Perikanan TA 2013, ditargetkan sebesar Rp120.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp241.045.860,00 atau 200,87%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp121.045.860,00 atau 100,87%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Perikanan TA 2012 yang tercatat sebesar Rp13.390.000,00, terlihat mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2013 sebesar Rp227.655.860,00 atau 1.700,19%.

**(e) Retribusi Izin Usaha Rekreasi & Olah Raga**

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2013, ditargetkan sebesar Rp268.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp104.364.000,00 atau 38,94%, dengan demikian tidak tercapai target sebesar Rp163.636.000,00 atau 61,06%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Olah Raga TA 2012 yang bernilai nihil, maka pada TA 2013 terjadi kenaikan sebesar Rp104.364.000,00,00.

**(g) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada TA 2013 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00, pada TA 2013 tidak terdapat realisasi. Demikian juga pada TA 2012, retribusi ini juga tidak terdapat realisasi penerimaan.

**(h) Sumbangan Pihak Tiga**

Sumbangan Pihak Tiga pada TA 2013 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Pada TA 2013 terjadi salah pos penganggaran, dimana seharusnya dianggarkan dalam pos Lain-lain Penerimaan PAD yang sah, di dalam APBD TA 2013 dianggarkan kedalam pos Retribusi Perizinan Tertentu.

**3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2013, ditetapkan sebesar	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar	<b>365.392.583,00</b>	<b>292.560.386,00</b>	<b>73,08</b>

Rp365.392.583,00 atau 73,08%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak dapat mencapai target sebesar Rp134.607.417,00 atau 26,92%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2013 dibandingkan dengan realisasi TA 2012 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp292.560.386,00 terlihat pendapatan pada TA 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp72.832.197,00 atau 24,89%. Pendapatan ini seluruhnya merupakan pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.

#### 4. Lain – Lain PAD yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD yang Sah TA 2013, ditargetkan sebesar Rp6.864.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp5.854.431.543,00 atau 85,29%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak dapat mencapai target sebesar Rp1.009.568.457,00 atau 14,71%

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD TA 2012 yang tercatat sebesar Rp4.559.297.713,00, terlihat pendapatan pada TA 2013 naik sebesar Rp1.295.133.830,00 atau 28,41%.

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2013, digambarkan pada tabel berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	%
	<b>6.864.000.000,00</b>	<b>5.854.431.543,00</b>	<b>85,29</b>



No	Uraian	Tahun Anggaran 2013		%	Realisasi 2012 (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Bunga Jasa Giro	450.000.000,00	306.945.703,00	68,21	222.325.617,00
2	Bunga Deposito	500.000.000,00	499.386.302,00	99,88	343.116.400,00
3	Penerimaan Lainnya	3.340.000.000,00	3.054.140.031,00	91,44	2.817.572.029,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yg sah	2.574.000.000,00	1.993.959.507,00	77,47	1.176.283.667,00
Jumlah		6.864.000.000,00	5.854.431.543,00	85,29	4.559.297.713,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2013, antara lain sebagai berikut:

**a. Bunga Jasa Giro**

Bunga Jasa Giro TA 2013 ditargetkan sebesar Rp450.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp306.945.703,00 atau 68,21%, dengan demikian realisasi Bunga Jasa Giro tidak dapat mencapai target sebesar Rp143.054.297,00 atau 31,79%.

**b. Bunga Deposito**

Bunga Deposito TA 2013, ditargetkan Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp499.386.302,00 atau 99,88%, dengan demikian realisasi Bunga Deposito tidak dapat mencapai target sebesar Rp613.698,00 atau 0,12%, yang disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga Bank.

**c. Penerimaan Lainnya**

Penerimaan Lainnya terealisasi sebesar Rp3.054.140.031,00 atau 91,44% dari target sebesar Rp3.340.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan lainnya kurang dari target sebesar Rp285.859.969,00 atau 8,56%.

Rincian penerimaan Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2013		%
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Sumbangan Pihak ketiga	2.000.000.000,00	1.935.370.031,00	96,77
2	Donasi Bandara	1.340.000.000,00	1.118.770.000,00	83,49
Jumlah		3.340.000.000,00	3.054.140.031,00	91,44

Untuk anggaran sumbangan pihak ketiga Dinas Perikanan terjadi salah penganggaran, dalam APBD dianggarkan kedalam kelompok penerimaan retribusi sebesar Rp30.000.000,00 dan terjadi realisasi sebesar Rp13.600.000,00 sudah masuk dalam nilai Rp.1.935.370.031,00.

**d. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah**

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dianggarkan sebesar Rp2.574.000.000,00 dan sampai dengan akhir TA 2013 terealisasi sebesar Rp 1.993.959.507,00, atau 77,47%. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah

selama TA 2013 tidak dapat mencapai target sebesar Rp580.040.493,00 atau 22,53%.

Rincian penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2013		%
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan PAD yang sah	1.625.000.000,00	545.214.342,00	33,55
2	Bis Bandara	75.000.000,00	67.250.000,00	89,67
3	Akta Pendirian Koperasi	161.000.000,00	300.000,00	0,19
4	Bis sekolah	63.000.000,00	5.500.000,00	8,73
5	Peti Kemas	158.000.000,00	108.990.000,00	68,98
6	Pengembalian Dana	-	684.374.665,00	-
7	Penjualan Telur Ayam/Ayam Prostock	242.000.000,00	22.000.000,00	9,09
8	Jasa Askes	250.000.000,00	491.360.500,00	196,54
9	Sewa Kios Pasar Tradisional	-	68.970.000,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.574.000.000,00</b>	<b>1.993.959.507,00</b>	<b>77,47</b>

### Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)

Pendapatan Transfer TA 2013 ditargetkan sebesar Rp604.418.367.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp606.008.253.543,00 atau 100,26%, dengan demikian di Tahun 2013 realisasi Pendapatan Transfer melampaui target sebesar Rp1.589.886.543,00 atau 0,26%.

Apabila realisasi Pendapatan Transfer TA 2013 dibandingkan dengan realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp538.753.914.271,00, realisasi Pendapatan Transfer TA 2013 naik sebesar Rp67.254.339.272,00 atau 12,48%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2013 disajikan pada tabel berikut:

No.	Uraian	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>	<b>547.345.576.000,00</b>	<b>548.427.292.935,00</b>	<b>100,20</b>	<b>491.077.229.963,00</b>
1.1	Bagi Hasil Pajak	33.500.000.000,00	29.628.043.318,00	88,44	30.660.387.231,00
a	Pajak Bumi dan Bangunan	32.500.000.000,00	26.770.495.610,00	82,37	27.394.339.555,00
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	1.000.000.000,00	2.857.547.708,00	285,75	3.266.017.676,00
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	6.772.000.000,00	11.725.673.617,00	173,15	12.462.757.732,00
a	PSDH	609.000.000,00	263.170.461,00	43,21	411.431.236,00
b	Royalti	6.000.000.000,00	11.102.841.864,00	185,05	11.707.340.277,00
c	Pungutan Hasil Perikanan	163.000.000,00	347.408.873,00	213,13	343.986.219,00
d	Pertambangan Panas Bumi	-	12.252.419,00	-	-
1.3	Dana Alokasi Umum	462.645.746.000,00	462.645.746.000,00	100,00	404.588.285.000,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	44.427.830.000,00	44.427.830.000,00	100,00	43.365.800.000,00
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>49.722.791.000,00</b>	<b>51.240.275.000,00</b>	<b>103,05</b>	<b>37.197.651.680,00</b>
2.1	Dana Penyesuaian	49.722.791.000,00	51.240.275.000,00	103,05	37.197.651.680,00
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>7.350.000.000,00</b>	<b>6.340.685.608,00</b>	<b>86,27</b>	<b>10.479.032.628,00</b>
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.350.000.000,00	6.340.685.608,00	86,27	10.479.032.628,00
a	Bagi Hasil dari PKB	1.250.000.000,00	1.078.403.946,00	86,27	6.991.749.318,00
b	Bagi Hasil dari BBNKB	1.000.000.000,00	1.532.652.401,00	153,27	1.534.868.469,00
c	Bagi Hasil dari PBBKB	5.000.000.000,00	3.729.629.261,00	74,59	1.920.504.001,00
d	Bagi Hasil dari Pajak ABT	-	-	-	-
e	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	100.000.000,00	-	-	31.910.840,00
	<b>Jumlah</b>	<b>604.418.367.000,00</b>	<b>606.008.253.543,00</b>	<b>100,26</b>	<b>538.753.914.271,00</b>

## 5. Dana Bagi Hasil Pajak

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
Bagi Hasil Pajak TA 2013 ditargetkan sebesar Rp33.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp29.628.043.318,00 atau 88,44%, dengan demikian TA 2013 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target sebesar Rp3.871.956.682,00 atau 11,56%.	<b>33.500.000.000,00</b>	<b>29.628.043.318,00</b>	<b>88,44</b>

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak TA 2012 yang tercatat Rp30.660.387.231,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak di TA 2013 turun sebesar Rp1.032.343.913,00 atau 3,37%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

### a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA 2013 ditargetkan Rp32.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai sebesar Rp26.770.495.610,00 atau 82,37%, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target sebesar Rp5.729.504.390,00 atau 17,63%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan TA 2012 yang tercatat sebesar Rp27.394.339.555,00 penerimaan bagi hasil PBB di TA 2013 turun sebesar Rp623.843.945,00 atau 2,28%.

### b. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh TA 2013 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp2.857.547.708,00 atau 285,75%, dengan demikian TA 2013 melampaui target sebesar Rp1.857.547.708,00 atau 185,75%.

Apabila realisasi penerimaan PPh TA 2013 dibandingkan dengan realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp3.266.017.676,00, realisasi PPh di TA 2013 turun sebesar Rp408.469.968,00 atau 12,51%.

## 6. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2013 ditargetkan Rp6.772.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp11.725.673.617,00 atau 173,15%, dengan demikian	<b>6.772.000.000,00</b>	<b>11.725.673.617,00</b>	<b>173,15</b>

realisasi penerimaan melebihi target sebesar Rp4.953.673.617,00 atau 73,15%. Apabila total realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2013 dibandingkan dengan total realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp12.462.757.732,00, maka pada TA 2013 turun sebesar Rp737.084.115,00 atau 5,91%. Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2013 bersumber dari:

No	Uraian	Anggaran	Th 2013	Th 2012
1	PSDH	609,000,000.00	263,170,461.00	411,431,236.00
2	Royalti	6,000,000,000.00	11,102,841,864.00	11,707,340,277.00
3	Perikanan	163,000,000.00	347,408,873.00	343,986,219.00
4	Pertambangan Panas Bumi	-	12,252,419.00	-
	Jumlah	6,772,000,000.00	11,725,673,617.00	12,462,757,732.00

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2013 bersumber dari:

**a. PSDH sebesar Rp263.170.461,00**

Bagi Hasil SDA dari PSDH TA 2013 ditargetkan sebesar Rp609.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp263.170.461,00 atau 43,21%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari PSDH tidak mencapai target sebesar Rp345.829.539,00 atau 56,79%. Apabila total realisasi PSDH TA 2013 dibandingkan dengan total realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp411.431.236,00, maka pada TA 2013 turun sebesar Rp148.260.775,00 atau 36,03%.

**b. Royalti sebesar Rp11.102.841.864,00**

Penerimaan Royalti TA 2013 ditargetkan sebesar Rp6.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp11.102.841.864,00 atau 185,05%, dengan demikian penerimaan dari Royalti melebihi target sebesar Rp5.102.841.864,00 atau 85,05%. Apabila total realisasi Royalti TA 2013 dibandingkan dengan total realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp11.707.340.277,00, maka pada TA 2013 turun sebesar Rp604.498.413,00 atau 5,16%.

**c. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp347.408.873,00**

Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan TA 2013 ditargetkan sebesar Rp163.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp347.408.873,00 atau 213,13%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan melampaui target sebesar Rp184.408.873,00 atau 113,13%. Apabila total realisasi Pungutan Hasil

Perikanan TA 2013 dibandingkan dengan total realisasi TA 2012 yang tercatat sebesar Rp343.986.219,00, maka pada TA 2013 meningkat sebesar Rp3.422.654,00 atau 0,99%.

**d. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp12.252.419,00**

Dalam Bagi Hasil SDA dari Pertambangan Panas Bumi TA 2013 tidak ditargetkan, akan tetapi sampai dengan akhir TA 2013 terdapat realisasi sebesar Rp12.252.419,00.

**7. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum TA 2013 dianggarkan sebesar Rp462.645.746.000,00 dan realisasi sampai akhir TA 2013 sebesar Rp462.645.746.000,00 atau 100 %.	<u><b>Anggaran</b></u>	<u><b>Realisasi</b></u>	<b>%</b>
	<b>462.645.746.000,00</b>	<b>462.645.746.000,00</b>	<b>100,00</b>

**8. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus TA 2013 dianggarkan sebesar Rp44.427.830.000,00 dan realisasi sampai akhir TA 2013 sebesar Rp44.427.830.000,00 atau 100 %.	<u><b>Anggaran</b></u>	<u><b>Realisasi</b></u>	<b>%</b>
	<b>44.427.830.000,00</b>	<b>44.427.830.000,00</b>	<b>100,00</b>

**9. Dana Penyesuaian**

Dana ini adalah meliputi dana yg diperuntukkan bagi tunjangan sertifikasi tenaga guru serta Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2) yang merupakan dana pendamping DAK.	<u><b>Anggaran</b></u>	<u><b>Realisasi</b></u>	<b>%</b>
	<b>49.722.791.000,00</b>	<b>51.240.275.000,00</b>	<b>103,05</b>

Dana Penyesuaian TA 2013 dianggarkan sebesar Rp49.722.791.000,00 dan realisasi sampai akhir TA 2013 sebesar Rp51.240.275.000,00 atau 103,05%. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp1.517.484.000,00 atau 3,05%.

**10. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi**

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA 2013	<u><b>Anggaran</b></u>	<u><b>Realisasi</b></u>	<b>%</b>
---	------------------------	-------------------------	----------

dianggarkan sebesar **7.350.000.000,00** dan realisasi sampai akhir tahun 2013 sebesar **6.340.685.608,00** atau **86,27%**. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar **Rp1.009.314.392,00** atau **13,73%**. Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

**a. Bagi Hasil dari PKB**

Bagi Hasil dari PKB TA 2013 dianggarkan sebesar **Rp1.250.000.000,00** dan realisasi sampai TA 2013 sebesar **Rp1.078.403.946,00** atau **86,27%**. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar **Rp171.596.054,00** atau **13,73%**.

**b. Bagi Hasil dari BBNKB**

Bagi Hasil dari BBNKB TA 2013 dianggarkan sebesar **Rp1.000.000.000,00** dan realisasi sampai akhir tahun 2013 sebesar **Rp1.532.652.401,00** atau **153,27%**. Realisasi tersebut melampaui target sebesar **Rp532.652.401,00** atau **53,27%**.

**c. Bagi Hasil dari PBBKB**

Bagi Hasil dari PBBKB TA 2013 dianggarkan sebesar **Rp5.000.000.000,00** dan realisasi sampai akhir tahun 2013 sebesar **Rp3.729.629.261,00** atau **74,59%**. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar **Rp1.270.370.739,00** atau **25,41%**.

**d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan**

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2013 dianggarkan sebesar **Rp100.000.000,00**, tetapi sampai dengan akhir TA 2013, tidak terdapat realisasi.

**11. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2013 dianggarkan sebesar **260.000.000,00** dan terrealisasi sebesar **119.009.570,00** atau **45,77%**. Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2013	
		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)
1	2	4	5
I	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>260.000.000,00</b>	-
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		-
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		
II	<b>Penerimaan Lainnya</b>		<b>119.009.570,00</b>
	Penerimaan Lainnya / TASPEN		119.009.570,00
	<b>Jumlah</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>119.009.570,00</b>

## 5.2.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah TA 2013 dianggarkan sebesar Rp680.242.853.875,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp644.511.331.313,00 atau 94,75%, sehingga sisa anggaran di TA 2013 yang tidak dapat diserap sebesar Rp35.731.522.562,00 atau 5,25%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah TA 2013 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2012 yang tercatat sebesar Rp583.598.274.723,00 terlihat peningkatan/kenaikan realisasi belanja di tahun 2013 sebesar Rp60.913.056.590,00 atau 10,44%.

Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2013 tergambar pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	%	Realisasi 2012 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	<b>JENIS BELANJA</b>				
I	<b>Belanja Operasi</b>	<b>537.468.950.911,00</b>	<b>512.305.482.258,00</b>	<b>95,32</b>	<b>464.451.387.833,00</b>
1	Belanja Pegawai	390.380.054.802,00	379.405.767.226,00	97,19	354.473.627.626,00
2	Belanja Barang	136.134.089.609,00	125.498.895.812,00	92,19	97.411.946.396,00
3	Belanja Bunga	333.000.000,00	218.856.504,00	65,72	37.421.241,00
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	4.882.806.500,00	4.739.102.000,00	97,06	3.007.460.000,00
6	Belanja Bantuan Sosial	5.739.000.000,00	2.442.860.716,00	42,57	9.520.932.570,00
II	<b>Belanja Modal</b>	<b>135.773.902.964,00</b>	<b>127.082.093.635,00</b>	<b>93,60</b>	<b>110.419.957.140,00</b>
1	Belanja Tanah	6.104.605.695,00	4.814.974.348,00	78,87	6.779.932.720,00
2	Belanja Peralatan dan mesin	25.431.318.076,00	24.505.475.335,00	96,36	19.350.415.582,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	57.304.185.686,00	52.718.360.690,00	92,00	40.705.968.967,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.183.293.507,00	44.306.034.462,00	95,94	41.084.476.271,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	750.500.000,00	737.248.800,00	98,23	2.499.163.600,00
6	Belanja Aset Lainnya				
III	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>5.123.755.420,00</b>	<b>73,20</b>	<b>8.726.929.750,00</b>
1	Belanja Tak Terduga	7.000.000.000,00	5.123.755.420,00	73,20	8.726.929.750,00
	<b>Jumlah (I,II dan III)</b>	<b>680.242.853.875,00</b>	<b>644.511.331.313,00</b>	<b>94,75</b>	<b>583.598.274.723,00</b>

### Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) TA 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>537.468.950.911,00</b>	<b>512.305.482.258,00</b>	<b>95,32</b>

Belanja Operasi TA 2013 dianggarkan sebesar Rp537.468.950.911,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai Rp512.305.482.258,00 atau 95,32%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp25.163.468.653,00 atau 4,68%.

Perincian Belanja Operasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Akun</b>	<b>Tahun 2013 (Rp)</b>
Belanja Pegawai	379.405.767.226,00
Belanja Barang dan jasa	125.498.895.812,00
Belanja Bunga	218.856.504,00
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	4.739.102.000,00
Belanja Bantuan Sosial	2.442.860.716,00
Jumlah	512.305.482.258,00

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>390.380.054.802,00</b>	<b>379.405.767.226,00</b>	<b>97,19</b>

Belanja Pegawai TA 2013 dianggarkan sebesar Rp390.380.054.802,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp379.405.767.226,00 atau 97,19%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran



yang tidak terserap sebesar Rp10.974.287.576,00 atau 2,81%.

Rincian belanja pegawai TA 2013 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai (Rp)
<b>Belanja Pegawai Tidak Langsung</b>	
- Belanja Gaji dan Tunjangan	304.682.087.401,00
- Belanja Tambahan Penghasilan	20.670.667.858,00
- Belanja Penerimaan Lain DPRD & Kpl Daerah	1.826.586.000,00
- Biaya Pungut Pajak Daerah	1.324.127.427,00
<b>Belanja Pegawai Langsung</b>	
- Honorarium PNS	18.466.322.500,00
- Honorarium Non PNS	30.533.629.340,00
- Uang Lembur	606.377.000,00
- Kursus / Pelatihan/ diserahkan kpd masyarakat	821.558.550,00
- Pengobatan	474.411.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>379.405.767.226,00</b>

## 2. Belanja Barang

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Belanja Barang TA 2013 ditargetkan sebesar Rp136.134.089.609,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai sebesar Rp125.498.895.812,00 atau 92,19%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp10.635.193.797,00 atau 7,81%.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>136.134.089.609,00</b>	<b>125.498.895.812,00</b>	<b>92,19</b>

Rincian Belanja Barang TA 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Belanja	Jumlah (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8.468.439.833,00
2	Belanja Bahan/Material	26.872.156.297,00
3	Belanja Jasa Kantor	14.589.629.643,00
4	Belanja Premi Asuransi	1.233.593.988,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.771.847.972,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.308.547.093,00
7	Belanja Sewa rumah/gedung	1.938.004.445,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	505.350.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	116.550.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	1.211.838.500,00
11	Belanja Makan dan Minum	10.779.001.616,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	915.373.400,00
13	Belanja Pakaian Kerja	477.426.900,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	345.754.500,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	33.095.603.476,00
16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	1.683.000.000,00
17	Belanja Bimbingan Teknis/Kursus	1.752.649.400,00
18	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana	2.691.164.550,00
19	Belanja Jasa Konsultansi	1.648.931.000,00
20	Belanja Barang yang akan diserahkan ke masyarakat	4.094.033.199,00
	<b>Jumlah</b>	<b>125.498.895.812,00</b>

### 3. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan beban bunga pinjaman jangka pendek pada TA 2013. Belanja bunga dianggarkan pada anggaran perubahan sebesar Rp333.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 adalah sebesar Rp218.856.504,00 atau 65,72%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp114.143.496,00 atau 34,28%.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
333.000.000,00	218.856.504,00	65,72

### 4. Belanja Hibah

Belanja Hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bantuan uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah TA 2013 dalam anggaran setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp4.882.806.500,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp4.739.102.000,00 atau 97,06%, terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp143.704.500,00 atau 2,94%.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
4.882.806.500,00	4.739.102.000,00	97,06

Realisasi belanja hibah TA 2013 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Komisi Penanggulangan AIDS	250.000.000,00
2	PKK kota Ternate	700.000.000,00
3	Dharma Wanita Kota Ternate	500.000.000,00
4	Pramuka	600.000.000,00
5	Korpri	500.000.000,00
6	KONI Kota Ternate	700.000.000,00
7	PMI	300.000.000,00
8	Badan Amil Zakat	200.000.000,00
9	KNPI	300.000.000,00
10	KPU	264.100.000,00
11	Panwas	100.000.000,00
12	TMD	325.002.000,00
	Jumlah	4.739.102.000,00

## 5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja ini digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
5.739.000.000,00	2.442.860.716,00	42,57

Dalam anggaran belanja bantuan sosial TA 2013 diantaranya reklasifikasi anggaran dan realisasi belanja bantuan keuangan partai politik masing-masing sebesar Rp538.500.000,00 dan Rp520.739.120,00. Semula anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial TA 2013 masing-masing sebesar Rp5.200.500.000,00 dan 1.922.121.596,00. Dengan penambahan tersebut, maka anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial masing-masing menjadi Rp5.739.000.000,00 dan Rp2.442.860.716,00.

Untuk mempermudah analisa perbandingan, reklasifikasi juga dilakukan atas realisasi belanja bantuan keuangan partai politik TA 2012 ke dalam belanja bantuan sosial TA 2012. Realisasi belanja bantuan sosial TA 2012 semula sebesar Rp9.000.193.450,00. Dengan menambahkan realisasi belanja bantuan keuangan partai politik sebesar Rp520.739.120,00, maka realisasi belanja bantuan sosial setelah reklasifikasi menjadi Rp9.520.932.570,00.

Belanja Bantuan Sosial TA 2013 dianggarkan sebesar Rp5.739.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp2.442.860.716,00 atau 42,57%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp3.296.139.284,00 atau 57,43%. Bantuan Sosial ini diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Keagamaan, dan bantuan keuangan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

Partai Politik.

Realisasi belanja bantuan sosial TA  
2013 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.872.121.596,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	50.000.000,00
3.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	520.739.120,00
	Jumlah	2.442.860.716,00

### Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	%
135.773.902.964,00	127.082.093.635,00	93,60

Belanja Modal TA 2013 dianggarkan sebesar Rp135.773.902.964,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp127.082.093.635,00 atau 93,60%, dengan demikian TA 2013, sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat diserap sebesar Rp8.691.809.329,00 atau 6,40%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akun	Tahun 2013 (Rp)
Belanja Tanah	4.814.974.348,00
Belanja Peralatan dan Mesin	24.505.475.335,00
Belanja Gedung dan Bangunan	52.718.360.690,00
Belanja Jalan , Irigasi dan Jaringan	44.306.034.462,00
Belanja Aset Tetap lainnya	737.248.800,00
Jumlah	127.082.093.635,00

### 6. Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah TA 2013 dianggarkan sebesar Rp6.104.605.695,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp4.814.974.348,00 atau 78,87% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp1.289.631.347,00 atau 21,13%. Belanja tanah sebesar Rp4.814.974.348,00 tersebut berupa

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	%
6.104.605.695,00	4.814.974.348,00	78,87

belanja tanah kantor.

#### 7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin TA 2013 dianggarkan sebesar Rp25.431.318.076,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp24.505.475.335,00 atau 96,36% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp925.842.741,00 atau 3,64 %.

<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b>%</b>
<b>25.431.318.076,00</b>	<b>24.505.475.335,00</b>	<b>96,36</b>

Rincian belanja peralatan dan mesin adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Alat Berat	398.672.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	3.745.312.004,00
3	Belanja Modal Alat angkut Darat tidak Bermotor	-
4	Belanja Modal Alat Angkut Air Bermotor	-
5	Belanja Modal Alat Angkut Air Tidak Bermotor	-
6	Belanja Modal Alat angkut Udara	-
7	Belanja Modal Alat Bengkel	165.160.025,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian	2.049.343.000,00
9	Belanja Modal Peralatan Kantor	1.538.618.000,00
10	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	547.204.900,00
11	Belanja Modal Komputer	3.392.015.540,00
12	Belanja Modal Mebulair	1.681.046.106,00
13	Belanja Modal Alat Dapur	90.407.300,00
14	Belanja Modal Penghias rumah tangga	298.137.400,00
15	Belanja Modal alat studio	661.410.860,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	103.272.000,00
17	Belanja Modal Alat Ukur	144.175.000,00
18	Belanja Modal alat Kedokteran	762.726.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.927.975.200,00
	Jumlah	24.505.475.335,00

#### 8. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2013 dianggarkan sebesar Rp57.304.185.686,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp52.718.360.690,00 atau 92,00%, dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap

<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b>%</b>
<b>57.304.185.686,00</b>	<b>52.718.360.690,00</b>	<b>92,00</b>

sebesar Rp4.585.824.996,00 atau 8,00%.

#### 9. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2013 dianggarkan sebesar Rp46.183.293.507,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp44.306.034.462,00 atau 95,94%. Sisa anggaran yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp1.877.259.045,00 atau 4,06%.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>46.183.293.507,00</b>	<b>44.306.034.462,00</b>	<b>95,94</b>

Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan	31.587.063.513,00
2.	Belanja Modal Jembatan	672.029.000,00
3.	Belanja Modal Jaringan Air	6.127.136.849,00
4.	Belanja Modal Penerangan Jalan	4.351.048.000,00
5.	Belanja Modal Instalasi Listrik Telepon	1.568.757.100,00
	<b>Total</b>	<b>44.306.034.462,00</b>

#### 10. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2013 dianggarkan sebesar Rp750.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir TA 2013 mencapai sebesar Rp737.248.800,00 atau 98,23%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp13.251.200,00 atau 1,77%.

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>750.500.000,00</b>	<b>737.248.800,00</b>	<b>98,23</b>

Rincian belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	522.586.300,00
2	Belanja Modal Barang bercorak kesenian	
3	Belanja Modal Hewan ternak / Tanaman	
4	Alat Keamanan	214.662.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>737.248.800,00</b>

#### 11. Belanja Tak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan

<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
<b>7.000.000.000,00.</b>	<b>5.123.755.420,00</b>	<b>73,20</b>

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga TA 2013 dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00. Sampai dengan akhir TA 2013 belanja ini direalisasikan sebesar Rp5.123.755.420,00 atau 73,20%.

### 5.2.3 Pembiayaan Daerah

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan TA 2013 dianggarkan sebesar Rp37.779.486.875,00 berupa penerimaan pinjaman daerah. Sampai dengan akhir TA 2013, penerimaan pinjaman daerah ini tidak direalisasikan. Realisasi sebesar minus Rp14.430.759.540,00 merupakan penggunaan SikPA TA 2012.	<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b>%</b>
	<b>37.779.486.875,00</b>	<b>(14.430.759.540,00)</b>	<b>(38,19)</b>

Penggunaan SikPA TA 2012 selisih sebesar Rp14.081.770,00 dari SikPA TA 2012 yaitu sebesar Rp14.416.677.770,00. Hal tersebut disebabkan koreksi saldo awal yang diakibatkan kesalahan pencatatan oleh Bidang Akuntansi pada Laporan Keuangan Tahun 2012, yaitu:

- 1) Terjadi 2 kali pengurangan potongan SP2D Batal pada daftar penguji yang mengurangi nilai PFK sebesar (Rp5.175.000,00);
- 2) Kesalahan pencatatan PFK sebesar (Rp9.000,00) pada tanggal 2 Oktober 2012;
- 3) Terjadi kurang catat PFK sebesar Rp759.346,00 pada tanggal 4 November 2012;
- 4) Terjadi 2 kali pengurangan potongan IMB pada daftar penguji yang mengurangi nilai PFK sebesar (Rp9.630.000,00);
- 5) Selisih kurang sebesar (Rp27.116,00) merupakan akumulasi dari kelebihan/kekurangan setor PFK pada tahun-tahun sebelumnya.

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2013 dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000,00, realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar Rp5.579.600.000,00 atau 97,04%. Seluruh pengeluaran pembiayaan	<b><u>Anggaran</u></b>	<b><u>Realisasi</u></b>	<b>%</b>
	<b>5.750.000.000,00</b>	<b>5.579.600.000,00</b>	<b>97,04</b>

tersebut merupakan penyertaan modal yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BPR Syariah	2.250.000.000,00
2	PDAM	1.000.000.000,00
3	Bank Maluku	500.000.000,00
4	PD. Citra Gamalama	1.829.600.000,00
	Jumlah	5.579.600.000,00

### 3. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIkPA)

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran TA 2013 dianggarkan sebesar nihil, realisasi sampai dengan akhir TA 2013 sebesar minus Rp17.822.064.283,00 atau 0,00%. Sisa kurang pembiayaan tersebut ditutup dengan menggunakan Dana Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Negara.	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
	<b>0,00</b>	<b>(17.822.064.283,00)</b>	<b>0,00</b>

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu Tahun Anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2013.

Arus kas Pemerintah Kota Ternate selama Tahun 2013 mengalami penurunan bersih sebesar Rp7.109.872,00, jumlah ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp129.270.388.892,00, selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar minus Rp127.082.093.635,00, selisih kurang arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar minus Rp5.579.600.000,00 dan selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp3.384.194.871,00. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp11.519.434,00. Di samping itu terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp314.260.712,00, dan juga saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp9.400.000,00, sehingga jumlah keseluruhan Kas adalah sebesar Rp335.180.146,00.

Berikut disajikan secara rinci penjelasan atas Laporan Arus Kas untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013.

#### 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp646.699.626.570,00, jumlah arus keluar kas sebesar Rp517.429.237.678,00. Dengan demikian, arus kas bersih dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp129.270.388.892,00. Rincian arus masuk	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2012</b>
	129.270.388.892,00	101.308.013.362,00



kas dan arus keluar kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

#### Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	2013	2012
1	Hasil Pajak Daerah	21.586.741.654,00	17.989.070.701,00
2	Hasil Retribusi Daerah	12.765.797.677,00	10.066.416.034,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	365.392.588,00	292.560.386,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.854.431.584,00	4.559.297.713,00
5	Bagi Hasil Pajak	29.628.043.318,00	30.660.387.231,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	11.725.673.617,00	12.462.757.732,00
7	Dana Alokasi Umum	462.645.746.000,00	404.588.285.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	44.427.830.000,00	43.365.800.000,00
9	Dana Penyesuaian	51.240.275.000,00	37.197.651.680,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	6.340.685.608,00	10.479.032.628,00
11	Pendapatan Hibah		2.758.840.000,00
12	Pendapatan Lainnya	119.009.570,00	66.231.840,00
	Jumlah	646.699.626.570,00	574.486.330.945,00

#### Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai	379.405.767.226,00
2	Belanja Barang	125.498.895.812,00
3	Belanja Bunga	218.856.504,00
4	Belanja Hibah	4.739.102.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.442.860.716,00
6	Berlanja Tidak Terduga	5.123.755.420,00
	Jumlah	517.429.237.678,00

## 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus masuk kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah nihil, sedangkan jumlah arus keluar kas sebesar Rp127.082.093.635,00. Dengan demikian, arus kas bersih dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp127.082.093.635,00. Rincian arus keluar kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebagai berikut:

	<u>Tahun 2013</u>	<u>Tahun 2012</u>
	(127.082.093.635,00)	(110.419.957.140,00)

#### Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

No	Uraian	Nilai(Rp)
1	Tanah	4.814.974.348,00
2	Peralatan dan Mesin	24.505.475.335,00
3	Gedung dan Bangunan	52.718.360.690,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	44.306.034.462,00
5	Aset tetap lainnya	737.248.800,00
	Jumlah	127.082.093.635,00

### 3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus masuk kas dari aktivitas Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah nihil, sedangkan jumlah arus keluar kas sebesar Rp5.579.600.000,00. Dengan demikian, arus kas bersih dari aktivitas Investasi Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar minus Rp5.579.600.000,00.

<u>Tahun 2013</u>	<u>Tahun 2012</u>
(5.579.600.000,00)	(4.750.000.000,00)

### 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus masuk kas dari aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp48.142.140.094,00, sedangkan jumlah arus keluar kas sebesar Rp44.757.945.223,00. Dengan demikian, arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.384.194.871,00. Arus kas masuk diantaranya kas masuk dari pemotongan pajak, IWP, Taperum dan Askes terkait belanja gaji maupun belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh BUD. Dalam rincian arus kas tersebut juga termasuk aktivitas penyetoran saldo Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

<u>Tahun 2013</u>	<u>Tahun 2012</u>
3.384.194.871,00	9.495.241.542,00

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pemerintah Kota Ternate memiliki 42 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 42 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate dalam Tahun 2013 juga telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012, berupa perbaikan dalam pelaporan pendapatan, pelaporan pengelolaan aset, pelaporan nilai investasi, penatausahaan perhitungan PFK, dan beberapa rekomendasi lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate TA 2013 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2013.